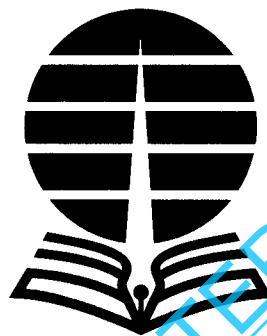


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP) BIDANG SARANA DAN PRASARANA DI DESA
MERAH ARAI KECAMATAN KAYAN HULU
DI KABUPATEN SINTANG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ELY YAKIM

NIM. 015743546

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pontianak, April 2013

Yang menyatakan



ELY YAKIM
NIM. 015743546

ABSTRAK

IMPLEMENTATION NATIONAL PROGRAMME COMMUNITY EMPOWERMENT INDEPENDENT RURAL (PNPM-MP) OF INFRASTRUCTURE AND FACILITIES AT MERAH ARAI VILLAGE KECAMATAN KAYAN HULU

ELY YAKIM

Email : elyakimkarwur@yahoo.com

Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak

Kata Kunci : Community empowerment, independent rural and infrastructure Development.

This research conducted to identify and analyze how the implementation proses PNPM-mP of infrastructure and facilities at Merah Arai village Kecamatan Kayan Hulu.

This research used a qualitative descriptive approach, interview data collection method for primary data and documentation to obtain secondary data.

The subject of this research that people who are considered to know and understand the issues that will be examined, namely : a head office of community empowerment and the village Kayan Hulu community leaders of desa Merah Arai.

As for implementation process of infrastructure and facilities at desa Merah Arai village Kayan Hulu, with the following stages : 1). Phase of orientation and socialization, 2). Phase the planning of activities PNPM-MP, 3). Stages of implementation PNPM-MP, 4). Stages of preservation activities PNPM-MP, 5).phase of control activities PNPM-MP.

Analysis of influencing factors in implementing PNPM-MP of infrastructure and facilities at Merah Arai vilaage Kayan Hulu is as follows :

1. Communication
2. Resource factors, namely : 1). Human resources, 2). Material resources, and 3). Resources methods.
3. Disposition factors (attitude) of implementor, namely : 1). Implementor commitment, 2).implemntor honesty, 3).communicative, 4).witty and 5).democratic.
4. Bureaucatic structures.

Another factor findings in the field are very influential in implementing PNPM-MP at desa Merah Arai village was a factor transportation access to and from the village ind question.

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-
 MP) BIDANG SARANA DAN PRASARANA DI DESA MERAH ARAI
 KECAMATAN KAYAN HULU**

ELY YAKIM

Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak

Email : elyakimkarwur@yahoo.com

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Mandiri Perdesaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses implementasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana dan faktor apakah yang berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan metode wawancara untuk data primer dan metode dokumentasi untuk memperoleh data sekunder.

Subyek penelitian yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui dan paham dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Camat Kayan Hulu, Kepala Seksi di Kecamatan Kayan Hulu selaku PjOK, Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik Kecamatan (FTK) Unit Pengelola Kecamatan (UPK), Kepala Desa Merah Arai, Sekretaris Desa Merah Arai, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), BPD, Tokoh Masyarakat Merah Arai.

Proses implementasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut A: 1). Tahap Orientasi dan Sosialisasi, 2) Tahap Perencanaan kegiatan PNPM-MP Desa, 3). Tahap pelaksanaan kegiatan PNPM-MP, 4).Tahap pelestarian kegiatan PNPM-MP, 5) Tahap Pengendalian Kegiatan PNPM-MP.

Analisa faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi
2. Faktor Sumber Daya, yaitu 1) Sumber daya manusia, 2) sumber daya material dan 3) sumber daya metode.
3. Faktor disposisi (sikap) implementor, yaitu : 1) Komitmen implementor, 2) Kejujuran implementor, 3) Komunikatif, 4) Cerdik dan 5) Demokratis
4. Faktor Struktur Birokrasi

Faktor lain hasil temuan di lapangan yang sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP di desa Merah Arai adalah faktor akses transportasi menuju dan dari ke desa dimaksud.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh Karen itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Suciati, M.Sc,Ph.D
- (2) Kepala UPBJJ-UT Pontianak Bapak Ir. Edward Zubir, MM. selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Bapak Bupati Sintang yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pascasarjana;
- (4) Bapak Prof. Dr. Syamsuni Arman selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Tita Rosita, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (5) Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si selaku penanggungjawab program studi administrasi publik.

- (6) Camat Kayan Hulu Bapak. T. Manurung, S.Sos yang telah memberikan ijin kepada peneliti di Desa Merah Arai Kecamatan kayan Hulu.
- (7) Kepada Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil maupun moril
- (8) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Sintang, April 2013

Penulis

ELY YAKIM
NIM. 015743546

UNIVERSITAS TERBUKA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan 15418
Telp. 021 7415050 Fax. 021745588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Nana : ELY YAKIM
NIM : 015743546
Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP) BIDANG SARANA DAN PRASARANA DI DESA
MERAH ARAI KECAMATAN KAYAN HULU.

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada Direktur PPs-UT selaku Panitia Ujian Sidang.


Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, April 2013

Mengetahui
Kepala UPBJJ UT

Mahasiswa


Ir. EDWARD ZUBIR, MM.


ELY YAKIM, S.Sos
NIP.015743546

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi publik

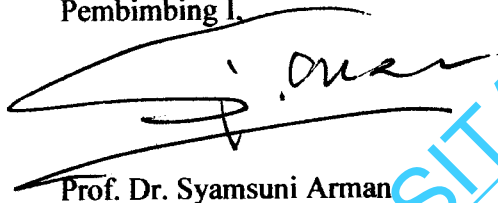
FLORENTINA RATIH WULANDARI, S.IP, M.SI
NIP. 19710609 199802 2 001

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM
MAGISTER (TAPM)**

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-
MP) Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu

Penyusun TAPM : ELY YAKIM
NIM: : 015743546
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/tanggal : Jum,at, 12 April 2013

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syamsuni Arman
G.B. EMERITUS

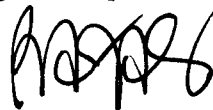
Pembimbing II,



Dr. Tita Rosita, M.Pd
NIP. 19601003 198601 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.P., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana



SUCIATI, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Penyusun TAPM : ELY YAKIM
NIM : 015743546
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-
MP) Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Terbuka :

Hari / tanggal : Jum,at 12 April 2013
Waktu : 15.45 – 16.50 Wib

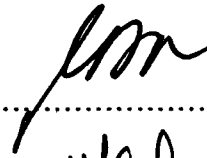
Dan telah dinyatakan : **L U L U S**


Ketua Komisi Penguji : Ir. Edward Zubir, MM

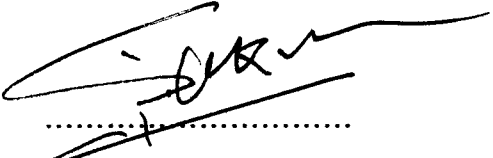
Penguji Ahli : Dr. Roy. V. Salomo, M.Soc.Sc.

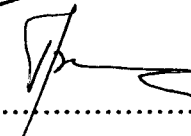
Pembimbing I, : Prof. Dr. Syamsuni Arman

Pembimbing II, : Dr. Tita Rosita, M.Pd









DAFTAR ISI

	Hal
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Terori	11
1. Implementasi Kebijakan	11
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	20
3. Sarana Prasarana	22
4. Faktor yang berpengaruh	32
a. Faktor Komunikasi	34
b. Faktor Sumber daya	36
c. Faktor Disposisi (sikap).....	38
d. Faktor Struktur Birokrasi.....	39
B. Kerangka Berpikir	40
1. Rujukan Teori	40
2. Bagan Alur Pikir.....	43
C. Definisi Operasional.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Desain Penelitian	45
B. Subyek Penelitian	46
C. Instrumen Pengumpulan Data	47
D. Prosedur Pengumpulan Data	48
E. Metode Analisa Data	49
BAB V TEMUAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum	50
1. Letak Geografis	50
2. Keadaan Wilayah	51
3. Jumlah Penduduk	51
4. Tingkat Pendidikan	52
5. Sarana dan Prasarana Umum	53
6. Mata Pencaharian	53
7. Agama	54
8. Prasarana Transportasi	54
9. Pemerintahan Desa	55

B. Proses Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan	62
1. Tahapan Orientasi dan Sosialisasi	62
2. Tahapan Perencanaan Kegiatan	68
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	80
4. Tahapan Pelestarian Kegiatan	90
5. Tahapan Pengendalian	94
C. Analisis Faktor yang berpengaruh dalam implementasi	98
1. Faktor Komunikasi	98
a. Penyaluran	99
b. Kejelasan	99
c. Konsistensi	100
2. Faktor Sumberdaya	100
a. Faktor Sumber Daya Manusia	100
b. Faktor Sumber Daya Material	103
c. Faktor Sumber Daya Metode	104
3. Faktor Disposisi	105
a. Komitmen Implementor	106
b. Kejujuran Implementor	108
c. Komunikatif	109
d. Cerdik	111
e. Demokratis	113
4. Faktor Struktur Birokrasi	117
 BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan Kerangka Pemikiran 42

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1. Nama Dusun, Kepala Dusun dan Jumlah penduduk....	51
2. Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	53
3. Tabel 4.3. Daftar Fasilitas umum	53
4. Tabel 4.4. Jenis Mata Pencaharian penduduk.....	54
5. Tabel 4.5. Agama dan Kepercayaan.....	54

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran A.1 Unsur Kabupaten
2. Lampiran B.1 Unsur Kecamatan
3. Lampiran B.2 Unsur Kecamatan
4. Lampiran B.3 Unsur Kecamatan
5. Lampiran C.1. Unsur Desa

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu : kemiskinan alamiah, kemiskinan struktur dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pengayagunaan.

Dampak krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Negara dan masyarakat luas yang semakin lamban. Kondisi ini diperburuk pula dengan fluktuasi harga minyak dunia yang mendorong kenaikan harga bahan pokok menambah beban bagi masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini, akan menambah jumlah penduduk miskin, terutama di daerah pedesaan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan

kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dalam tim Crescent 2003 (sebagaimana yang dikutip oleh Yowono dkk (2006 : 8) Pengertian kemiskinan didefinisikan sebagai berikut :

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) : Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari.
- b. Badan Koordinas Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) : Kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke saran kesehatan. Pengertian ini lebih lanjut menjadi keluarga miskin yaitu :
 - Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan/telur
 - Setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru
 - Luas lantai rumah paling kurang 8 M² untuk lima penghuni
- c. Bank Dunia : Kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US\$ 1 per hari.

Beberapa pengertian tentang kemiskinan di atas, maka dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana masyarakat tidak dapat menikmati kehidupan yang layak, oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah yang mempunyai tanggungjawab untuk mensejahterakan rakyatnya.

Berbagai upaya dan prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan pada pemberantasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat baik dikota maupun di daerah pedesaan. Untuk itu, pemerintah telah berupaya dengan membangun dan mengimplementasikan berbagai program anti kemiskinan mulai dari program seperti Impres Desa Tertinggal (IDT), Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Bantuan Langsung Tunai (BLT),

Bantuan Dana Bergulir, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk Orang Miskin (Raskin) dan program lain-lain, yang kesemua dari program itu ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin setiap tahunnya semakin bertambah.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sesuai dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat diumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya memberantas kemiskinan menjadi tidak berarti, apabila program-program itu direncanakan pemerintah atas dasar persepsi dan asumsi yang keliru terhadap sebab-sebab munculnya kemiskinan, dan perencanaan program anti kemiskinan dilakukan seragam baik dari segi bentuk dan model pelaksanaannya, tanpa memperhatikan adanya variasi dari berbagai definisi dan sebab terjadinya kemiskinan, serta lemahnya monitoring dari pemerintah terhadap program anti

kemiskinan. Hal ini berakibat terjadinya penyimpangan baik dari segi seleksi penerimaan maupun biaya yang digunakan untuk melaksanakan program, dan kurangnya dukungan penelitian perihal masalah – masalah kemiskinan serta evaluasi tentang dampak dari program-program anti kemiskinan terhadap perbaikan hidup orang miskin.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya dengan sebut PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM-MP merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

PNPM-MP ini secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 april 2007. Guna menindaklanjuti program PNPM-MP ini, maka Departemen Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Surat Keputusan (SK) Nomor ; 14.2/371/PMD Tahun 2008, telah menyusun pedoman teknis operasional PNPM-MP. Pendekatan langkah

operasional PNPM-MP merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PPM-MP dengan Visi dan Misi adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM-MP adalah :

- (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaanya.
- (2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
- (3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local;
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM-MP, maka sesuai buku pedoman teknis operasional PNPM-MP, strategi yang dikembangkan PNPM-MP yaitu menjadikan Rumah Tanggal Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan PNPM-MP lebih

menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM-MP diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduk 363.978 jiwa, dengan kepadatannya rata-rata 27 jiwa/km. Komposisinya terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah petani sawit dan karet. Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 281 Desa. Kecamatan-kecamatanannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kecamatan Kayan Hulu yang memiliki luas wilayah sebesar 937,50 Km², terdiri dari 29 Desa dengan jumlah penduduk 21.854 jiwa, atau rata – rata jumlah penduduk 754 jiwa per desa. Kecamatan Kayan Hulu merupakan Kecamatan tergolong tertinggal dari Kecamatan lainnya, maka dengan itu PNPM-MP mendapat prioritas, untuk mengimplementasikan PNPM-MP ini akan di fokuskan di desa – desa yang dianggap tertinggal. Pada tahun 2010 Kecamatan Kayan Hulu mendapat alokasi Dana Bantuan PNPM-MP sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) yang teralokasi ke – 18 desa, Desa Merah Arai merupakan salah satu dari 18 desa yang

mendapatkan alokasi dana Bantuan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 97.200.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan hasil Pembangunan adalah Gedung Serbaguna.

Desa Merah Arai merupakan salah satu desa yang dikategorikan desa tertinggal di wilayah kecamatan Kayan Hulu. Desa Merah Arai dengan jumlah penduduk 699 jiwa dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah hanya 3% yang taman Sekolah Menengah Atas dan 0,6% yang berpendidikan tinggi. Pelaksanaan kebijakan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, dari hasil pengamatan sementara adanya fenomena-fenomena pelaksanaan kebijakan yang belum terimplementasikan dengan baik. Adapun fenomena-fenomena atau masalah tersebut adalah :

- a. Ada indikasi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan atau penerimaan program tersebut.
- b. Peranan aparat desa dan orang – orang tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi masih mendominasi kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang seharusnya mendapat respon dan dukungan dari masyarakat, justru yang menonjol perannya adalah aparat pemerintah desa dan orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi atau yang mempunyai akses dengan pemerintah kecamatan. Sehingga dalam proses perencanaan program sebagai bentuk awal kegiatan program PNPM-MP banyak didominasi perannya oleh aparat desa dan orang-orang tertentu yang dianggap mampu memodali atau menanggulangi

kegiatan tersebut. Pada hal partisipasi masyarakat sangat diharapkan, karena pelaksanaan PNPM-MP adalah kegiatan yang bersifat partisipatif yang mana mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada pemeliharaan hasil kegiatan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti Proses Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Lokasi penelitian dilakukan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang dengan pertimbangan bahwa :

- (1) Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu merupakan salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana dan Kecamatan ini relatif mudah dijangkau sehingga dapat lebih efisien dan efektif dari segi waktu dan biaya.
- (2) Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu termasuk desa dikategorikan tertinggal dari desa lain di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, sehingga menarik untuk dijadikan lokasi penelitian.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses implementasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang?.
2. Faktor apakah yang berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasana di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Proses Implementasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasikan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Adapun tujuan secara teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan bidang kajian kebijakan publik dalam mendukung efektivitas implementasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasana dalam rangka mengentaskan masyarakat miskin.

- b. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi kajian pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kebijakan publik.
- c. Menambah atau memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, dengan harapan dapat berguna bagi masyarakat, serta dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pikiran bagaimana pelaksana PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, dalam meningkatkan kualitas layanan pada PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana dalam menjaga keberlanjutan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana atau program lain yang sejenis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan program pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Nugroho (2009: 618) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) yang dikutip Nugroho (2009: 629) “bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan”. Menurut Sumardi (2005: 78) “Implementasi program pemerintah dapat dipandang dari tiga sudut yang berbeda yaitu pertama, pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan, kedua, pejabat-pejabat pelaksana di lapangan dan yang ketiga, aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu dituju, yaitu kelompok sasaran”.

Menurut Hogowood dan Gunn (1978) yang dikutip Nugroho (2009: 630) kedua pakar ini mengemukakan bahwa, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi esternal yang dihadapi oleh lembag/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Jones (1991) yang dikutip oleh Nawawi (2009: 132) “bahwa implementasi kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”.

Selanjutnya menurut Nawawi (2009: 132-133) mengemukakan bahwa implementasi suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut :

1. Organisasi : Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi : Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan : Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Kemudian menurut Pressman dan Wildavsky (dikutif oleh Jones, 1991: 29) mendefinisikan sebagai berikut: “implementasi dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”. Di sisi lainnya Anderson (sebagaimana dikutif oleh Winarno, 2022: 16) mengemukakan bahwa “implementasikan adalah merupakan kebijakan yang mempunyai dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, dampak terhadap situasi atau orang/kelompok yang bukan menjadi sasaran utama kebijakan dan berdampak serta berpengaruh pada kondisi sekarang atau masa yang akan datang”. Lebih sederhana lagi yang diungkapkan oleh Poerwadaminta (1997: 377) mengartikan “implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan”.

Menurut Suwitri (2010: 1.9) “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan *input* yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan”.

Beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa ketika kita berbicara kebijakan, maka konsep kebijakan yang ada adalah suatu pilihan dari alternatif yang ada sebagai suatu solusi terhadap permasalahan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak hanya diarahkan pada diri sendiri atau lingkungan kerja. Karena bicara kebijakan sering dilihat pada aktor atau pelaku kebijakan yang ada. Kebijakan juga cenderung diarahkan pada lingkungan atau masyarakat luar. Lebih

tegas lagi yang diungkapkan oleh Dye (sebagaimana dikutip oleh Winarno 2002: 15) menyatakan bahwa: “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

(Sanyoto 2010) menyatakan bahwa:

Hasil penelitian pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan menyatakan bahwa:

- (1) pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Sungai Tebelian melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap perencanaan fisik infrastruktur dan tahap pelaksanaan fisik infrastruktur. (2) Hambatan teknis memang ditemui yaitu berkaitan dengan pelaksanaan fisik infrastruktur di kecamatan Sungai Tebelian terdapat beberapa pelaksanaan pekerjaan yang mutunya masih dibawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman pengurus OMS terhadap masalah teknis serta belum optimalnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait;
- (2) Proses PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur menyatakan bahwa : pada umumnya sangat didukung dan diterima masyarakat. Beberapa alasan sehingga masyarakat mendukung dan menerima adanya kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan yaitu : dapat ikut serta dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di desanya serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Sungai Tebelian ternyata dipengaruhi sejumlah faktor, mulai faktor organisasi pelaksana, komunikasi, kepatuhan pelaksana, dan dukungan kelompok sasaran;
- (3) Pelaksanaan fisik menyatakan bahwa : Dalam pelaksanaan fisik infrastruktur masih terdapat kelemahan terutama dengan kaitnya kepatuhan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), dan dukungan kelompok sasaran yang belum disertai dengan dukungan kemampuan sumber daya masyarakat sebagai tenaga kerja yang memadai, Sehingga pelaksanaan fisik infrastruktur belum dilaksanakan secara optimal. Tetapi secara umum implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Sungai Tebelian telah berjalan cukup baik.

Implementasi PNPM-MP adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM-MP merupakan pengembangan dari Program

Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direkur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 14.2/371/PMD tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Operasional PNPM-MP terdapat tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1. Tujuan umum.

Tujuan umum PNPM-MP adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2. Tujuan khusus meliputi :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- e. Mengembangkan pengelolaan dana bergulir
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Pencapaian tujuan umum dan tujuan khusus tersebut di atas, maka di peroleh manfaat dan dampak yang dapat dinikmati langsung maupun tidak

langsung oleh masyarakat sasaran program. Adapun yang ingin dicapai dalam program ini sesuai Surat Keputusan Direkur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 14.2/371/PMD tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Operasional PNPM-MP adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
- b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
- c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
- d. Berfungsi dan bermanfaat hasil kegiatan PNPM-MP bagi masyarakat
- e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM
- f. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan
- g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Pengimplementasian tujuan umum dan tujuan khusus serta manfaat (keluaran program) sesuai dengan Surat Keputusan Direkur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, sesuai dengan ketentuan di atas, maka dituangkan dalam bentuk peran pelaku-pelaku PNPM-MP sebagai berikut :

Peran Pelaku-Pelaku PNPM-MP

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM-MP pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-MP tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsiten.

Pelaksanaan PNPM-MP diperlukan para implementor yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukan serta kewenangan yang

diberikan dan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu selain masyarakat adalah pelaku utama PNPM-MP, ada pelaku – pelaku lain yang sangat diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM-MP agar mencapai tujuan, prinsip dan manfaatnya bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pelaku-pelaku dimaksud dalam ketentuan di atas, berperan langsung terhadap kegiatan sesuai Surat Keputusan Direkur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 14.2/371/PMD tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Operasional PNPM-MP adalah sebagai berikut :

1. Pelaku di perdesaan.

Pelaku di desa adalah adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, meliputi :

- 1) Kepala Desa, berperan sebagai pembina dan pengendalian kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan
- 3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan.
- 4) Tim Penulis Usulan (TPU) mempunyai fungsi dan peranan menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes.
- 5) Tim Pemantau, mempunyai fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada didesa.
- 6) Tim Pemelihara, mempunyai peranan menjalankan fungsi pemerliiharaan terhadap ghasil-hasil kegiatan yang ada di desa.

- 7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (KPMD/K) mempunyai peranan dan fungsi memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
- 8) Kelompok Masyarakat ((Pokmas) adalah yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Pelaku di Kecamatan.

Berkedudukan di ibu kota kecamatan, adapun pelaku-pelaku sebagai berikut :

- 1) Camat, berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan.
- 2) Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atau Pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
- 3) Tim Verifikasi (TV) Tim yang dibentuk dan anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, dibidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.
- 4) Unit Pengelola Kegiatan (UPK), peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan lenjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. UPK mendapatkan penugasan BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.
- 5) Badan Pengawas – UPK (BP-UPK) berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota. BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.
- 6) Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-KeC) adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran FK dan FT adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. FK dan FT juga

- berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.
- 7) Pendamping Lokal (PL) adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK/FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.
 - 8) Tim Pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. Serta memberikan masukan dan saran agar MAP dapat berlangsung secara partisipatif.
 - 9) Badan Kerja Antar Desa (BKAD) adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa disatu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana – prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.
 - 10) Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah kecamatan dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.

Pengimplementasian suatu kebijakan publik yang telah diluncurkan oleh pemerintah perlu dilakukan oleh semua pihak yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan, prinsip dan hasil yang akan dicapai dari program yang telah ditetapkan. Untuk itu maka perlu adanya berbagai strategi yang harus dipersiapkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program, agar efektivitas pelaksanaannya suatu kebijakan dapat sesuai tujuan dari kebijakan atau program tersebut. Sumaryadi (2005: 109) menyatakan “efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat tergantung pada perspektif yang digunakan dalam menilai efektivitas atau suksesnya implementasi, di samping itu juga sangat erat kaitnya dengan aspek-aspek yang hendak disoroti”.

Selanjutnya menurut Goggin (1990) yang dikutip oleh Suamrdi (2005: 111) menjelaskan “ bahwa ada tiga perspektif implementasi yang ditonjolkan yakni : (1) proses (2) output, (3) outcomes. Masih menurut Sumaryadi (2005: 111) menyatakan “ Perspektif proses menilai efektivitas implementasi kebijaksanaan dari sudut seberapa jauh peraturan-peraturan, atau mandat-mandat, yang sudah ditetapkan pada tingkat atas diefektifkan pelaksanaannya oleh pemerintah atau aparat tingkat bawah.

2. Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Krishna 2003 (Kurniawan 2010: 5.3) Pemberdayaan masyarakat sebagai “peningkatan kapasitas perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pengembangan (*development*) dan pilih dan (hidup) dan mentransformasikan pilihan tersebut kedalam tindakan yang diinginkan dan ke dalam hasil bagi pengembangan dari komunitas mereka”. Selanjutnya menurut Kurniawan (2010: 5.21) menyatakan bahwa “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses bagi masyarakat yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka”. Robinson (1994: 12) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembahasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan He (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*” yang berarti memberi daya, memberi “*power*” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Payne (1997:10) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Menurut Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Mandiri Perdesaan adalah kemampuan suatu desa untuk keluar dari ketergantungannya pada pihak lain, dan dapat berswadaya dengan kemampuan sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan bebas dari pengaruh pihak lain. Perdesaan yang berasal dari kata “Desa”, desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah “Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Moenir (1992) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan umum, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

- 1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- 2) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
- 3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
- 4) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna / pelaku.
- 5) Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
- 6) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- 7) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan menggunakannya.

Untuk mewujudkan PNPM-MP agar sesuai dengan visi, misi, tujuan umum, tujuan khusus, dan prinsip dari PNPM-MP yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan adanya partisipatif seluruh elemen masyarakat dalam memberdayaan masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin yang ada di desa, perlu adanya

upaya-upaya sebelum pelaksanaan fisik pembangunan atau pelaksanaan program. Adapun upaya – upaya sebelum program dilaksanakan, penulis mau menganalisa proses implementasi PNPM-MP dari tahapan sebagai berikut :

a. Orientasi dan Sosialisasi PNPM-MP.

Sosialisasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan menyebarkan informasi dan program yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, untuk mendapatkan tanggapan atau respon yang diperlukan agar informasi yang disampaikan dipahami dan dimengerti oleh kelompok sasaran. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang penuh dengan norma-norma dan petunjuk harus disosialisasikan dengan baik, termasuk kebijakan pemerintah mengenai PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu sebelum memulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, hal terpenting yang dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan desa diantaranya adalah:

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2./316/PMD tanggal 29 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP tahun 2008) sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sebelumnya
- 2) kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai8 melalui PNPM Mandiri Perdesaan tahap sebelumnya
- 3) inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah)
- 4) inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri Perdesaan yang akan masuk ke desa, dan lain-lain

Tahap pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM-MP secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM-MP di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM-MP memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM-MP.

Untuk mewujudkan tujuan umum PNPM-MP yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, agar efektif dan efisien dari pelaksanaan program di atas dan tahapan – tahapan yang telah diurai diatas, maka diperlukan suatu perencanaan yang baik dan mampu melihat atau meramal hal-hal yang akan terjadi di depan. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan perencanaan menurut Nitisastro (2005: 15) adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan tujuan
Suatu perencanaan tidak dapat dibuat tanpa ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai, sebab perencanaan justru dibuat untuk mencapai tujuan
- b. Mengumpulkan data serta menetapkan dugaan-dugaan serta ramalan-ramalan.
Dengan membuat perencanaan perlu dikumpulkan data yang diperlukan serta ramalan atau dugaan tentang masa yang akan datang. Agar perencanaan yang dibuat itu bersifat operasional dan sesuai dengan situasi dan kondisi.
- c. Menetapkan Alternatif cara bertindak.
Dengan menetapkan berbagai alternatif berarti mengusahakan sedapat mungkin beberapa cara yang dapat ditempuh, sehingga menghasilkan alternatif yang paling baik. Tanpa menetapkan alternatif maka akan menimbulkan cara bertindak yang tidak realistis dan tidak ekonomis.
- d. Mengadakan Penilaian Alternatif

Alternatif yang telah kita tetapkan harus diadakan penilaian. Dengan penilaian ini akan mengetahui kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari masing-masing alternatif

e. Memilih Alternatif

Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing, alternatif kita dapat memilih yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Tepat disini berarti lebih efisien dan efektif.

Suatu perencanaan yang baik selain membuat tahapan-tahapan seperti tersebut diatas juga harus memuat unsur-unsur perencanaan agar perencanaan dapat terarah. Adapun unsur-unsur perencanaan menurut Sastroamijoyo(1995: 57) terdiri dari

f. Tinjauan keadaan.

Tinjauan keadaan atau *review* ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana atau sesuatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang (masih) dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan.

g. Perkiraan masa yang akan dilalui rencana.

Sering juga disebut sebagai *forecasting*. Dalam hal ini diperlukan data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan

h. Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan.

Dalam hal ini sering kali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana

i. Identifikasi kebijaksanaan

Suatu kebijaksanaan mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan

j. Persetujuan rencana

Disini diusahakan penyerasian dengan perencanaan pembiayaan secara umum dari pada program-program perencanaan yang akan dilakukan

Perencanaan merupakan hal yang harus dipersiapkan sedemikian rupa sebelum dilaksanakan kegiatan PNPM-MP. Ada beberapa unsur perencanaan yang harus disiapkan oleh pelaku PNPM-MP sebelum melaksanakan kegiatan. Beberapa unsur atau komponen perencanaan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan PNPM-MP tersebut antara lain mencakup :

1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi
2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi
3. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Penggalan Gagasan
5. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)
6. Musyawarah Desa Perencanaan
7. Penulisan Usulan Desa
8. Verifikasi Usulan
9. MAD Prioritas Usulan
10. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan
11. Musdes Informasi Hasil MAD
12. Pengesahan Dokumen SPPB.

Menurut pendapat penulis, sosialisasi sangat diperlukan dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu PNPM-MP yang akan di implementasi agar mendapatkan manfaat bagi kelompok sasaran, dengan melihat proses implementasi PNPM-MP dalam mensosialisasikan semua program yang akan dilaksanakan.

Koordinasi adalah merupakan bentuk hubungan kerja yang dibuat sedemikian rupa, agar para pelaksana kegiatan / program dapat melaksanakan suatu program berjalan dengan baik, yaitu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Siwi (2001: 6) menyatakan bahwa “koordinasi adalah salah satu bentuk

hubungan kerja yang memiliki karakteristik husus. Karakteristiknya antara lain harus adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah yang sama". Menurut Stoner (1994) yang dikutip Siwi dkk (2001: 8) menyatakan bahwa "koordinasi adalah proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif". Bratakusumah (2003) berpendapat bahwa "koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya menyetarakan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, dimana ketiga komponen tersebut semua terlibat".

Pendapat para ahli di atas, menurut penulis menunjukkan bahwa koordinasi sangat diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang melibatkan lebih dari satu orang untuk menyatukan langkah dan strategi dalam rangka melaksanakan kegiatan atau program yang diamanatkan atau yang diberikan oleh Badan atau Institusi.

Koordinasi pelaksanaan PNPM-MP melibatkan pelaku-pelaku yang terlibat langsung di lapangan, telah di tuangkan dalam SK. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP sebagai berikut:

1. Tingkat Desa :
 - 1) Kepala Desa
 - 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD atau sebutan lain)

- 3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
- 4) Tim Penulis Usulan (TPU)
2. Tingkat Kecamatan :
 - 1) Camat atas nama Bupati
 - 2) Penanggung jawab Operasioanal Kegiatan (PjOK)
 - 3) Tim Verifikasi (TV)
 - 4) Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 - 5) Badan Pengawasan UPK (BP-UPK)
 - 6) Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)
 - 7) Pendamping Lokal (PL)
 - 8) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
 - 9) Setrawan Kecamatan.

Peran pelaku-pelaku diatas adalah orang atau kelompok orang yang mempunyai kapasitas dan kewenangan dalam melaksanakan suatu program yang telah diluncurkan oleh pemerintah, porgram ini merupakan program yang harus diimplementasikan agar mendapat manfaat, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran sesuai dengan tujuan, keluaran program dan prinsip-prinsip PNPM-MP.

b. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat pada Tahapan Perencanaan PNPM-MP

Pemberdayaan adalah sebuah kata yang bersifat emotif dan menarik bagi beberapa orang. Kata ini mengandung ide bahwa orang berada dalam pengendalian diri sendiri dan lingkungan mereka, yang memperluas kemampuan dan wawasan mereka dan mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kepuasan yang lebih besar.

Untuk memahami makna dan dampaknya secara penuh mengenai konsep pemberdayaan, Wilson (1996: 3-5) menggambarkan dalam tiga tahapan, yaitu:

Pertama, pada tingkat politik dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa kita setiap hari sebagai mekanisme bantuan diri bagi orang lain (*mechanism of self-help for people*). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa justru orang ingin mengubah sesuatu mengenai keadaan mereka saat ini adalah diri mereka sendiri. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan-lahan diganti oleh ketergantungan pada diri sendiri. Oleh karena itu, pada tingkat nasional *self-dependency movement* terus mendapat tempat.

Kedua, pada tingkat organisasi, pemberdayaan mempunyai daya tarik. Selalu ada pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru dan pemberdayaan lebih baru, lebih segar daripada banyak teori peningkatan dan motivasi kerja yang sudah usang. Untuk sampai kepada defenisinya, penting disadari bahwa hanya mengubah pekerjaan seseorang tidak akan mungkin menghasilkan pemberdayaan. Banyak faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan terkandung dalam inilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur, dan budaya organisasi. Perubahan-perubahan harus dilakukan pada tingkat-tingkat ini yang berada di luar pengaruh individu. Mereka tidak mungkin terjadi tanpa perencanaan dan pelepasan yang menyeluruh dari kekuasaan oleh manajer senior organisasi.

Ketiga, pada tingkat individu. Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap individu. Ada yang lama, ada juga yang singkat prosesnya. Bila pemberdayaan efektif, hasilnya sangat inifrasional. Individu-individu sudah mengubah kehidupan mereka mencapai tujuan dan target yang terjangkau yang mereka anggap tidak mungkin. Mereka sudah membuka jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan yang menguntungkan mereka maupun organisasi. Bila tim dan individu yang diberdayakan secara kolektif bekerja bersama, maka sinergi magis tercapai.

Lowe (1995: 26) memberikan batasan pemberdayaan sebagai “proses sebagai akibat darimana individu memiliki otonomi, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan mereka rasa kepemilikan dan kepenuhan bilamana mencapai tujuan-tujuan bersama organisasi”.

Sementara itu, Foy (1995: 5) memberikan batasan *empowerment* “mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka didengar, untuk memberikan

kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi anda, untuk menggunakan keahlian anda di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja dan kinerja seluruh organisasi”.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah merupakan faktor yang sangat penting. Partisipasi masyarakat bukanlah sekedar pelengkap, tetapi merupakan faktor yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Bahkan Dun (dalam Ndrana 1987: 103) mengatakan bahwa “partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan atau bukan”. Jika masyarakat yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan.

c. Mendorong Swadaya Masyarakat Desa pada Tahap Pelaksanaan PNPM-MP

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM-MP. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

Menurut Eko (2005: 8) “swadaya merupakan kekuatan modal sosial ditingkat lokal, dan swadaya masyarakat sangatlah penting untuk mendidik mental yang mandiri warga desa”.

d. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Tahapan Pelestarian Kegiatan PNPM-MP.

Kelembagaan adalah organisasi kerja yang ada dimasyarakat dan dibentuk sendiri oleh masyarakat atau dibentuk oleh pihak lain karena atas syarat dan desakan yang mengharuskan ada organisasi kerja. Dengan kelembagaan tersebut masyarakat secara formal dapat mengaktualisasikan diri, baik dalam masyarakat itu sendiri maupun keluar dari lingkungannya. Kelembagaan yang dimaksud dalam PNPM-MP adalah Tim kerja yang dibentuk berdasarkan tingkatan peran pelaku PNPM-MP.

e. Tahapan Pengendalian Kegiatan PNPM-MP

Pengendalian PNPM-MP dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak

lanjutnya. Tahapam pengendalian merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

4. Analisa Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik perlu dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak agar program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mendapatkan manfaat. Nawawi(2007:135) bahwa “berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan baik terkait dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat.” Masih Nawawi (2007: 135) menyatakan bahwa:

Dalam implementasi kebijakan implementor yang terlibat di selain kaum birokrat banyak lagi antara lain yang turut terlibat, contohnya para legislator, hakim dan orang perorangan yaitu :

1. Kaum birokrat sendiri terlibat dalam aktivitas-aktivitas fungsional lainnya di samping dalam aktivitas implementasi.
2. Para legislator sering diminta nasihatnya, karena keahlian mereka dalam administrasi kebijakan pada bidang tertentu, dan selain itu mereka juga sering terlibat dalam masalah-masalah kepegawaian dan penunjukan administrasi.
3. Hakim terkait dengan kasus implementasi kebijakan. Peranan pengadilan dalam pembentukan kebijakan secara khusus dapat dilihat dalam hal penafsiran Undang-Undang, khususnya dalam nilai Undang-undang nasional yang bertentangan dengan konstitusi.
4. Partisipasi dari kelompok perorangan di dalam implementasi kebijakan memiliki beberapa bentuk. Kelompok ini sering bekerjasama dengan badan-badan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tersebut.

Menurut Horn 1975 (dalam Nawawi: 139) dalam implementasi ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- f. Standar dan sasaran kebijakan;

- g. Sumberdaya;
- h. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- i. Karakteristik agen pelaksana; dan
- j. Disposisi implementor
- k. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Syukur 1986 (dalam Sumaryadi 2005: 79) mengemukakan “adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (i) adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan (ii) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (iii) unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.” Sedangkan menurut George C. Edwards 1980 (dalam Nawawi 2005;136) berpendapat model “implementasi kebijakan yang berpektif *top down* pandang Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel, yakni : (1) Komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi’.

Menurut pendapat Mazmanian & Sabatier 1983 (sebagaimana dikutip oleh Nawawi 2007: 145) mengungkapkan bahwa “implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel, yaitu : (1) karakteristik masalah (*tractability of the problems*), (2) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statue to structure implementation*), dan (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variabls affecting implementation*). Kerangka konseptual yang dapat digunakan analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistis, menurut Cheema dan Rondinelli 1983 (dalam Nawawi 2007; 148) “ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu : (1) kondisi lingkungan, (2) hubungan antar organisasi, (3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program, (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk implementasi kebijakan diperlukan suatu norma-norma atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pedoman untuk dipahami semua pihak, agar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dapat dioperasikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan prinsip yang telah dirumuskan oleh pengambil kebijakan. Dalam mengimplementasikan PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, penulis berpijak pada model implementasi yang di lontarkan seorang ahli yaitu : Edwards (dalam Nawawi 2007 :136), untuk menganalisa faktor penting yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yaitu PNPM-MP dengan menganalisa variabel sebagai berikut:

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik secara langsung, secara lisan maupun tak langsung melalui media (Efendy 1993: 45). Berdasarkan pandangan tersebut, maka oleh Pace dkk (1998: 56) bahwa komunikasi memiliki unsur : 1) Komunikator, 2) komunikan, 3) pesan, 4) unit penerima dan pengirim 5) proses 6) adanya tujuan atau efek tertentu.

Peningkatan peranan komunikasi dalam organisasi pada dasarnya adalah agar mempunyai kemampuan mengembangkan proses penyampaian gagasan, perasaan dan pandangan pegawai tingkat bawah kepada atasannya dalam

organisasi. Tubbs dalam (Thoha 1996: 5) Kemudian oleh Muhammad (1995: 58) menyatakan bahwa masing-masing jaringan komunikasi dalam organisasi dapat mengembangkan : 1) komunikasi kebawah, 2) komunikasi keatas, 3) komunikasi horizontal.

Menurut (Nawawi 2007: 136) menyatakan bahwa :

Komunikasi dalam implementasi kebijakan public agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu (1) penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasan, (2) adanya kejelasan yang diterima olehn pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang di komunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Gie (1982:11) menyatakan faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan.

Dengan beberapa pendapat para ahli diatas dapat dipahami bahwa komunikasi sangat diperlukan setiap orang atau kelompok orang dalam suatu organisasi untuk memahami dan meresapi apa yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan suatu program. Agar PNPM-MP dapat dilaksanakan

sesuai dengan visi, misi, tujuan dan prinsip, maka diperlukan suatu komunikasi antar pelaku PNPM-MP secara intensif.

b. Faktor sumberdaya

Sumberdaya adalah motor penggerak dari semua program yang akan diimplementasi, oleh sebab itu sumberdaya harus tersedia, agar di dalam mengimplementasikan kebijakan dapat dioperasionalkan dengan baik.

Nawawi (2007: 136) menyatakan bahwa: Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metode. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

Sumber daya manusia atau *human resource* menurut Alwi (2001: 6) dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering juga disebut karyawan atau *employee*. Dalam proposal ini yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah peran pelaku dalam implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- Perintah
- Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Adanya metode sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan, agar menjadi tolak ukur baik secara administratif maupun teknis.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

c. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk

implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Nawawi (2007: 137) menyatakan bahwa :

Disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijaksanaan sangat tergantung pada perspektif yang digunakan dalam menilai efektivitas atau suksesnya implementasi, disamping itu juga sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek yang hendak disoroti. Ripley 1985 dalam (Sumardi 2006: 109-110) mengatakan implementasi dari setiap kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif utama, atau foci/sisi yakni : (1) perspektif *compliance*; (2) perspektif *what's happening and why?*. Menurut Goggin, et al 1990 (dalam Sumardi 2006: 111) menjelaskan bahwa ada tiga perspektif implementasi yang ditonjolkan yakni : (1) proses, (2) output, dan (3) outcomes. Efektivitas implementasi kebijaksanaan dapat dilihat dari perspektif "*procces*" dan perspektif "*resulf*". Perspektif result inilah yang kemudian diperincinya menjadi dua sub perspektif lagi, yaitu "*output*" dan "*outcomes*".

d. Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen dalam struktur organisasi yaitu :

1. adanya spesialisasi kegiatan kerja
2. adanya standarisasi kegiatan kerja
3. adanya koordinasi kegiatan kerja
4. besarnya seluruh organisasi

Birokrasi dapat diartikan mengandung pengertian: (a) system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan; (b) cara bekerja atau pekerjaan yang lamban, serta menurut tata aturan (adapti, dsb) yang banyak liku-liku dan sebagainya.

Nawawi (2007: 138) Struktur Birokrasi adalah: Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi – posisi itu dibingkai untuk menunjukan interaksi formal yang ditetapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hierarchis yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi sebagai melalui lima hal harus tergambar, yaitu : (a) Jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “siapa yang bertanggung jawab kepada siapa”; (b) Pelembagaan berbagai jenis kegiatan Operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan; “siapa yang “melakukan apa?” (c) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan; “siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?” (d) Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (e) Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara

melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. Fungsi dari SOP menjadikan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur Organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

B. Kerangka Pemikiran

1. Rujukan Teori.

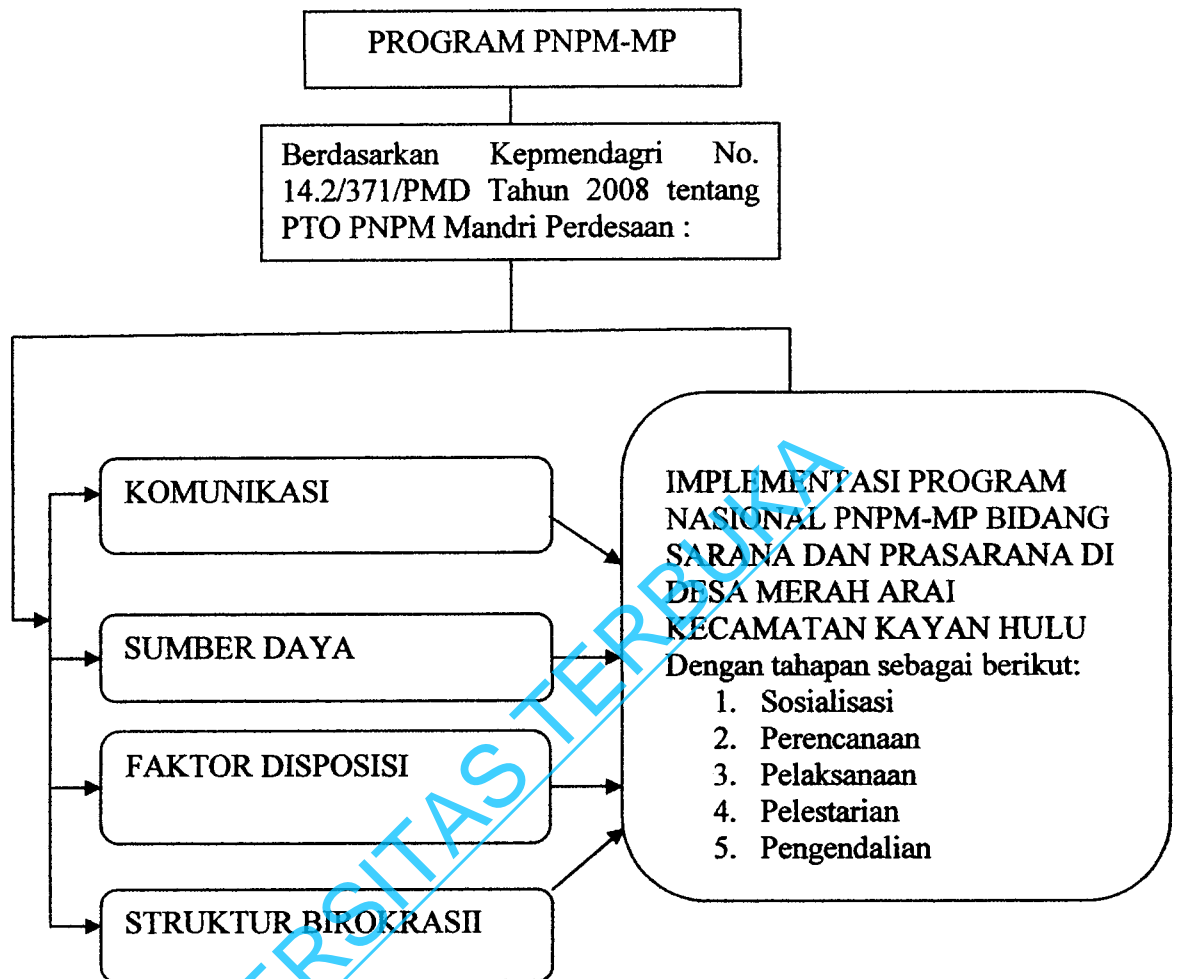
Kerangka pemikiran yang penulis maksud adalah alur pikir dalam penelitian yang mengacu pada kajian teori Edward III yang menjadi faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Menurut pandangan Edwards III tahun 1980 (dalam Nawawi 2007: 136) "implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi". Dalam penelitian ini penulis menganalisis keempat faktor yaitu: (a) faktor komunikasi (b) faktor sumberdaya dan (c) faktor disposisi dan (d) faktor struktur birokrasi. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi PNPM-MP, sesuai dengan

Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 14.2/371/PMD tahun 2008 dengan alur pikir sebagaimana pada diagram dibawah ini.

Analisis penulis memilih parameter diatas adalah bahwa dalam mengimplementasi suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien, maka perlu memperhatikan faktor – faktor yang berpengaruh dalam dalam proses pelaksanaan kebijakan dilapangan. Implementasi PNPM-MP di desa Merah Arai, penulis menganggap keempat faktor yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sangat relevan dan dapat menjadi parameter proses implementasi PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA

2. KERANGKA PEMIKIRAN



C. Defenisi Operasional.

Definisi Operasional adalah penjelasan tentang makna dari fokus penelitian, senada dengan Mage dan Priyoeidodo (2005: 13) menyatakan bahwa “Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable”. Dikatakan juga bahwa “Definisi Operasioanal adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variable yang sama”.

Dalam tulisan ini ada empat definisi operasional, menurut pandangan Edward III (1980) dalam Nugroho (2009:636) ”menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu : *communication, resource, disposition or attitudes, and bureaureatic structures*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan, Nugroho (2009:636).

2. Sumberdaya

Sumberdaya *resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Nugroho (2009:636)

3. Disposisi

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Nugroho (2009:636)

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Nugroho (2009:636)

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Irawan (2009: 4.7) “penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya,” sedangkan menurut Nawawi (2001: 630) penelitian deskriptif adalah “merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya”. Karena tujuan dari metode ini untuk menginterpretasikan perilaku manusia yang bermakna, baik tentang diri mereka sendiri atau orang lain.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan pihak – pihak yang dianggap berhubungan erat dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang ada di pemerintah daerah (kantor pemerintah yang terlibat) beserta masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, data sekunder akan dilacak terlebih dahulu setelah itu akan disusun pencarian data primer sebagai pelengkap atau klarifikasi demi kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan data, maka penelitian ini menggunakan proses sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan.

Dalam melakukan penelitian ini pada tahap awal akan dilakukan studi kepustakaan yaitu mempelajari berbagai kajian tentang topik penelitian sehingga penulis memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup memadai terhadap topik tersebut. Studi kepustakaan yang dipelajari antara lain : dokumen-dokumen pemerintah (Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati dan Petunjuk Teknis Operasional mengenai PNPM-MP.

2. Penelitian Lapangan

Setelah diperoleh pemahaman dan wawasan yang cukup memadai melalui studi kepustakaan yang dilakukan sebelumnya, maka tahap selanjutnya akan dilakukan penelitian lapangan, yakni penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah desa sasaran PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana Tahun 2010 di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak – pihak yang terlibat secara langsung dengan implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana. Pihak – pihak yang terlibat langsung disini adalah *implementor* yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, yang terdiri dari unsur :

1. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang

2. Camat Kayan Hulu Kabupaten Sintang
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kayan Hulu, selaku (PjOK) di Kecamatan.
4. Ketua (UPK) yang berada di ibu kota kecamatan
5. Fasilitator Kecamatan (FK)
6. Kepala Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu
7. Sekretaris Desa Merah Arai
8. Ketua BPD Desa Merah Arai
9. Tokoh Masyarakat Desa Merah Arai
10. Ketua Tim Pengelola Kegiatan di desa Merah Arai
11. Ketua (Kelompok Masyarakat) desa Merah Arai.

C. Instrumen Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang diperlukan dilapangan agar dapat tersusun dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara

Topik pertanyaan yang langsung dinyatakan kepada informan yakni dalam bentuk pertanyaan secara sistematis yang dicantumkan dalam media tertulis, hal ini menjadi pedoman peneliti dalam melakukan wawancara mendalam.

2. Alat Dokumentasi.

Alat ini dapat berupa tustel dan foto copy, alat ini digunakan untuk dapat menambah informasi apabila ada kekurangan dalam catatan yang dibuat peneliti pada saat wawancara.

D. Prosedur Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dalam usaha membangun teori dari data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan sepanjang penelitian tersebut berlangsung, mulai dari tahap proses memasuki lokasi penelitian maupun ketika berada di lokasi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara /*interview*, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian (informan). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).
2. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan tertulis baik dari pemerintah maupun dari Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang ada serta berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Irawan (2009: 4.11) “penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang datanya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, laporan, Koran, dan lain-lain sebagainya)”.

E. Metode Analisis Data.

Analisa data yang peneliti dilakukan sesuai dengan pilihan metode penelitian, penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif melalui logika induktif, yaitu *on goingproces* atau terus menerus. Miles dan Huberman (1986: 23) komponen dalam analisa data ada 3 (tiga) yaitu: a. pengolahan data, b. Tampilan data dan c. Simpulan/verifikasi. Metode analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Meringkas (reduksi) data, yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformsikan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
2. Menampilkan data dalam bentuk kalimat dan tabel.
3. Menyimpulkan data, yaitu menyusun kalimat sesuai dengan hasil penelitian di lapangan.

Tujuan analisis data adalah untuk membuat kesimpulan data yang dianggap relevan, data yang ada dikelompokkan sesuai dengan jenis datanya, saling dihubungkan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Merah Arai

1. Letak Geografis

Desa Merah Arai merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa induk yaitu Nanga Masau Kecamatan Kayan Hulu. Desa Merah Arai adalah satu dari dua puluh sembilan desa yang ada di Kecamatan Kayan Hulu. Letak desa Merah Arai dilalui oleh Sungai Kayan yang sarana lalu lintas, serta sarana transportasi dan sarana lalu lintasnya aktivitas perekonomian masyarakat dari ibu kota kecamatan ke desa – desa di jalur Sungai Kayan.

Secara administratif batas wilayah desa Merah Arai adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Abai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sungai Sampuk
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Nanga Masau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tanah Merah

Desa Merah Arai merupakan salah satu desa yang sangat strategis, karena letaknya berada pada jalur lalu lintas sungai dan darat dari desa-desa di hulu sungai kayan dan sungai masau. Desa-desa dimaksud di atas merupakan desa yang mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah, baik sumber daya hasil hutan kayu maupun hasil non kayu. Potensi yang ada ini, dapat dijadikan modal dalam pengembangan pembangunan di desa.

2. Keadaan Wilayah

Luas wilayah keseluruhan desa Merah Arai seluas : 39,50 Km². Desa Merah Arai merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung Bukit Alat. Pemerintahan Desa Merah Arai mencakup 4 Dusun yaitu Dusun Merah Arai I, Dusun Merah Arai II, Dusun Pandau I dan Dusun Pandau I. Selanjutnya untuk Desa Merah Arai di gambarkan nama dusun dan nama kepala dusun yang terdapat di desa Merah Arai dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1. Nama Dusun, Kepala Dusun, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rukun Tetangga Desa Merah Arai, Tahun 2011.

No	Nama Dusun	Nema Kepala Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah RT
1.	Merah Arai I	Supardi	179 jiwa	2
2.	Merah Arai II	Sujatmiko	186 jiwa	2
3.	Pandau I	Selvanus Bunau	180 jiwa	2
4.	Pandau II	Lemensius	154 jiwa	2

Sumber : Data Desa Merah Arai, Tahun 2011

Keadaan wilayah desa Merah Arai yang terdiri dari 4 dusun ini merupakan desa yang tergolong luas dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan menjadi suatu desa yang desa mandiri.

3, Jumlah Penduduk

Berdasarkan data –data yang peneliti peroleh dari Kantor Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, penduduk desa Merah Arai menurut jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 355 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 344 jiwa. Jadi secara keseluruhan jumlah penduduk desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu berjumlah 699 jiwa. Dari data yang diperoleh bahwa wilayah desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu merupakan desa yang masih sangat jarang penduduknya, hal

tersebut sebabkan banyak penduduk mencari pekerjaan ke kota dan tempat lain, sehingga banyak yang keluar dan menetap di tempat mendapatkan pekerjaan.

Keadaan penduduk desa Merah Arai dengan jumlah seperti tersebut di atas menggambarkan bahwa desa ini termasuk desa yang tingkat kepadatan penduduknya tergolong jarang, sehingga desa ini menjadi desa potensi sumber daya alamnya cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Sumber daya alam seperti hutan dan hasil hutan lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

3, Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang ada di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, tingkat pendidikan mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai lulusan Perguruan Tinggi atau sederajat sebagian besar sudah berpendidikan taman Sekolah Dasar (SD), walaupun masih ada diantaranya penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar. Dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.

Tingkat Pendidikan Penduduk.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	219	31%
2	Sekolah Menengah Pertama	100	14%
3	Sekolah Menengah Atas	20	3%
4	D1 s/d D3	4	0,6%
5	S1 s/d S3	-	-
6	Pernah Sekolah tidak tamat	300	43%
78	Belum Sekolah	56	8%
	Jumlah	699	

Sumber : Kantor Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, 2011.

Berdasarkan data tingkat pendidikan desa Merah Arai ini, menunjukkan bahwa desa ini tergolong desa tertinggal dan sumber daya manusia yang masih relatif tertinggal, oleh sebab itu desa ini perlu di dorong untuk berkembang khususnya dibidang pendidikan, terutama tingkat pendidikan lanjutan.

4. Sarana dan Prasarana Umum.

Berdasarkan data di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, terdapat sarana dan prasarana umum yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Fasilitas Umum.

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Sekolah	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Guru	2 buah	Baik
3	Kantor Desa	1 buah	Baik
4	Posyandu	1 buah	baik
5	Jembatan	5 buah	2 baik 3 rusak
6	Jalan Rabat Beton	1 buah	450 meter
7	Gereja	1 buah	Baik

Sumber : Kantor Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu. 2011

5, Mata Pencaharian

Penduduk Desa Merah Arai merupakan masyarakat tradisional yang mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber penghidupan, dengan demikian maka mata pencaharian adalah bercocok tanam. Mata pencaharian sebagian besar petani, selain petani ada juga sebagai tukang dan sebagian kecil pegawai negeri sipil. Mata pencahariannya sebagai petani, terutama petani karet, sehingga desa ini

berpotensi berkembang secara ekonomi, khususnya komoditi karet. Komoditi karet ini merupakan unggulan desa ini, dengan demikian dapat dipastikan perkembangan ekonomi dapat dikembangkan.

Tabel 4. Jenis mata pencaharian penduduk.

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Petani	420	
2	Tukang	104	
3	Pedagang	23	
4	Pegawai Negeri Sipil	6	
5	Pegawai Swasta	2	

Sumber : Kantor Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

6. Agama dan Kepercayaan.

Penduduk desa Merah Arai merupakan penduduk yang masih homogen, terlihat dari penganut agama dan kepercayaan masih di dominasi agama tertentu, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Data pemeluk agama dan kepercayaan

No	Agama	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Islam	2	
2	Katolik	328	
3	Protestan	368	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
		698	

7. Prasarana Transportasi

Keadaan transportasi di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, masih dominan menggunakan kendaraan air, dengan perahu bermesin dan speed boad. Jalan darat masih sulit untuk dilalui pada musim hujan, karena masih jalan tanah dan jembatan

masih jembatan darurat. Keadaan transportasi ini menggambarkan bahwa desa ini masih tergolong desa yang tertinggal dan akses masih menjadi permasalahan dasar.

Akses jalan darat masih tergantung cuaca, sehingga akses transportasi satu-satunya jalan sungai dengan motor tempel, dengan demikian dapat dipastikan bahwa biaya transportasi berbiaya tinggi. Berdasarkan data-data ini, maka desa ini merupakan desa yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

8. Pemerintahan Desa.

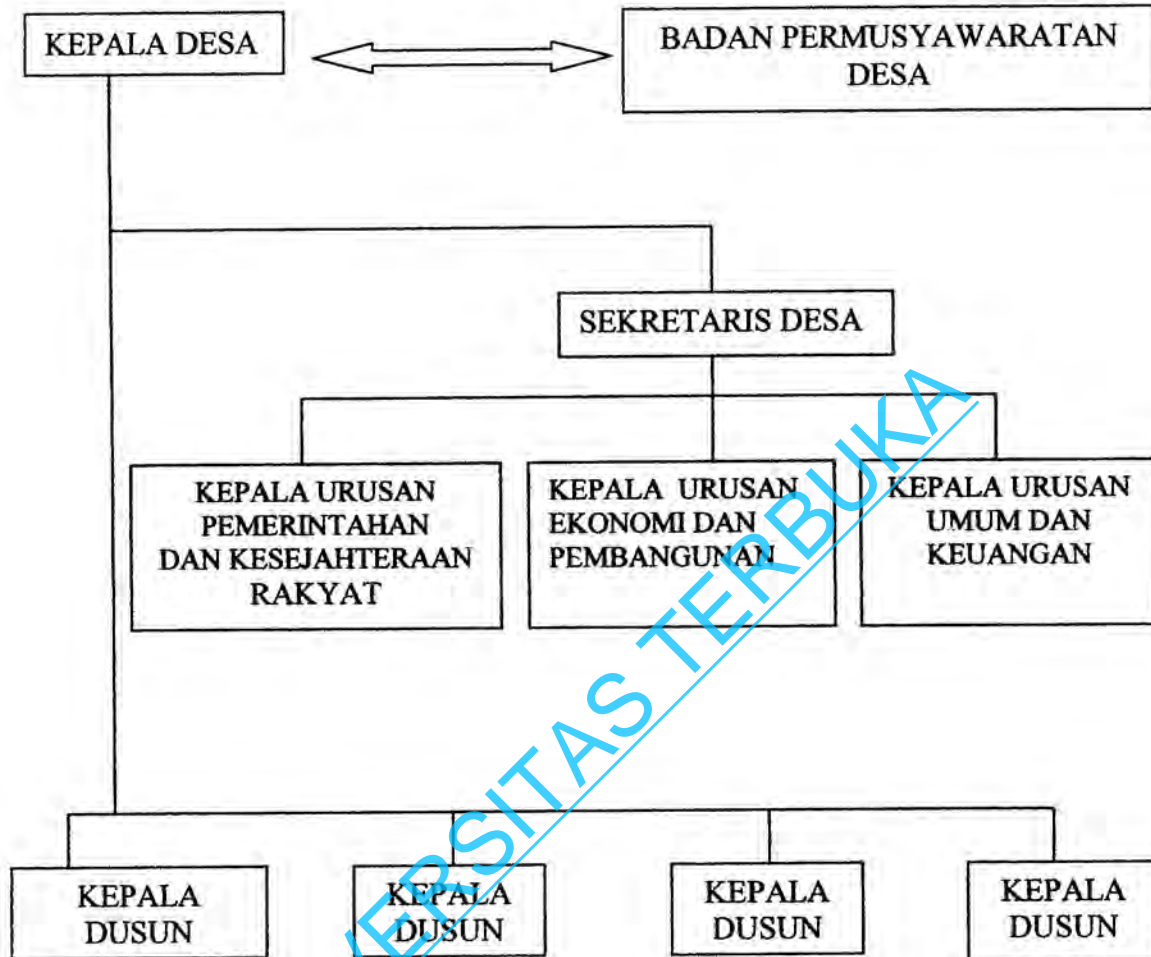
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Desa Merah Arai Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Merah Arai. Pemerintah Desa Merah Arai terdiri dari : Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Susunan Organisasi Perangkat Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan
- e. Kepala Urusan Umum dan Keuangan
- f. Kepala Dusun Dan Badan Permusyawaratan Desa

Bagan 1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.



Berdasarkan Peraturan Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu Nomor :

Tahun 2011, maka tugas dan fungsi perangkat desa Merah Arai adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa Merah Arai mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD;
4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinir pembangunan di desa secara partisipatif;
8. Mewakili desa di dalam dan di luar Pengadilan dan menunjuk kuasa huku untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperhatikan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
12. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat;
13. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
14. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme;
15. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
16. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
17. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
18. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

19. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 20. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 21. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 22. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 23. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 24. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- b. Sekretaris Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa;
 2. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan pelaporan, melaksanakan urusan keuangan, urusan administrasi umum dan membina pelayanan teknis ataupun administrasi kepada seluruh perangkat desa;
 3. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 4. Membantu kepala desa dalam penyusunan program kerja tahunan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala desa dan administrasi pelaporannya;
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Desa.
- c. Kepala Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana dan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;
2. Menyusun rencana dan menyampaikan bahan dalam angka pembinaan wilayah dan masyarakat;
3. Menyusun program, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan administrasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
4. Membantu pelaksanaan tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
5. Menyusun program dan administrasi di bidang kependudukan dan catatan sipil;
6. Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
7. Menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat badan permusyawaratan desa;
8. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan rakyat;
9. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana dan kesehatan pendidikan masyarakat;
10. Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infag, shadaqah dan kegiatan yang bersifat sosial;

11. Menyusun program dan melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan nasional;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- d. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun programan dan menyelenggarakan pembangunan di desa;
 2. Menyusun program dan melakukan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
 3. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pengadministrasian di bidang perekonomian dan pembangunan;
 4. Menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perkonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 5. Menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga serta memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan desa;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- e. Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menyusun program dan menyelenggarakan tata usaha kantor;
 2. Menyusun program dan menyelenggarakan surat menyurat;
 3. Menyusun program dan melakukan pengadministrasian acara rapat pemerintah desa yang bersifat resmi;
 4. Menyusun program dan melakukan pengadministrasian aparat pemerintah desa;

5. Menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
 6. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa;
 7. Mengurus dan membayar gaji aparat desa;
 8. Mengurus pembukuan keuangan desa
 9. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
 10. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang keuangan;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- f. Kepala Dusun mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
 2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
 3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
 4. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
 5. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
 6. Melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Lokasi penelitian ini merupakan gambaran desa yang masih dikategorikan desa tertinggal yang masih perlu perhatian banyak pihak dan para pengambil keputusan. Gambaran umum yang penulis gambarkan adalah untuk bahan menganalisis segala sumber daya yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasikan PNPM-MP ini.

B. Proses Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai

Proses implementasi PNPM-MP di desa Merah Arai kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang dalam pelaksanaannya melalui tahapan – tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Orientasi dan Sosialisasi

Orientasi dan sosialisasi PNPM-MP di desa Merah Arai yang dilaksanakan di dusun Pandau I, dusun Pandau II, dusun Merai Arai I dan dusun Merah Arai II merupakan proses awal dari implementasi kebijakan. Orientasi dan sosialisasi yang dilakukan merupakan tahapan yang sangat penting dalam mentransformasikan segala informasi dalam rangka menyebarluaskan informasi kebijakan yang harus diketahui dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sumaryadi (2005: 109) menyatakan “efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat tergantung pada perspektif yang digunakan dalam menilai efektivitas atau suksesnya implementasi, di samping itu juga sangat erat kaitnya dengan aspek-aspek yang hendak disoroti”.

Orientasi atau pengenalan lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unsur aparat desa yang akan diberi peran dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.

Selanjutnya menurut Goggin (1990) yang dikutip oleh Suamrudi (2005: 111) menjelaskan “ bahwa ada tiga perspektif implementasi yang ditonjolkan yakni : (1) proses (2) output, (3) outcomes. Masih menurut Sumaryadi (2005: 111) menyatakan “ Perspektif proses menilai efektivitas implementasi kebijaksanaan dari sudut seberapa jauh peraturan-peraturan, atau mandat-mandat, yang sudah ditetapkan pada tingkat atas diefektifkan pelaksanaannya oleh pemerintah atau aparat tingkat bawah.

Beberapa pendapat ahli diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi dari implementasi kebijakan, maka perlu adanya orientasi dan sosialisasi di kelompok sasaran.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka orientasi atau pengenalan desa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM-MP di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM-MP pada tahap sebelumnya.
- b. Kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dioyayai melalui PNPM-MP tahap sebelumnya.
- c. Inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah).
- d. Inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM-MP yang akan masuk desa, dan lain – lain.

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM-MP secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM-MP di semua pelaku PNPM-MP di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM-MP memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM-MP.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan, (pengajian, yasinan, persekutuan gereja dan lain-lain), pertemuan adat istiadat : (gotong royong, arisan, upacara adapt dan lain-lain) merupakan alternatif untuk menyebarluaskan informasi PNPM-MP dan media penerapan prinsip transparansi, agar visi dan misi PNPM-MP dapat tercapai.

Visi PNPM-MP adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungan, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM-MP adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
- c. Pengefektipan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM-MP, strategi yang dikembangkan PNPM-MP yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM-MP lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih.

Sosialisasi tujuan umum dan tujuan khusus PNPM-MP harus dilakukan agar dapat dipahami oleh masyarakat, adapun tujuan umum dan tujuan khusus dari PNPM-MP adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum PNPM-MP adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b. Tujuan Khusus adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- 2). Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- 3). Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- 4). Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- 5). Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- 6). Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)
- 7). Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Prinsip-prinsip yang harus disebarluaskan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami dan ikut berpartisipasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian, maka perlu dimengerti oleh seluruh masyarakat. Adapun prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

- 1). Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- 2). Otonomi, Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- 3). Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- 4). Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- 5). Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
- 6). Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan

- dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- 7). Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
 - 8). Transparansi dan Akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
 - 9). Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
 - 10). Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Pelaksanaan orientasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa Merah arai dan aparat desa terungkap dalam wawancara, dalam tahap orientasi ini, Menurut Camat Kayan Hulu :

Ya, Kecamatan Kayan Hulu ini, sebagian besar masih lewat sungai transportasinya, maka yang menjadi kendala adalah transportasi menuju desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, sehingga pembinaan tidak dapat efektif. Dalam mensosialisasikan program ini perlu dilakukan agar ada pemahaman yang lebih dari semua pihak dari maksud program ini, agar dapat diterima atau mendapat respons baik respond positif maupun kalau ada yang menolak, namun dalam perjalanannya program sangat diterima oleh masyarakat, ini semua karena adanya komunikasi yang baik antara

yang menyampaikan program ini dengan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.

Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan oleh tim yang telah terbentuk, kalau di kecamatan oleh UPK dan jajaranya. Senada dengan kepala desa Merah Arai mengatakan bahwa " ada pertemuan- pertemuan seperti musyawarah desa, musyawarah penggalian gagasan dan musyawarah khusus perempuan untuk menggali gagasan dari warga dari setiap dusun". Hasil penelitian dari dokumen-dokumen rapat yang dituangkan dalam berita acara pertemuan, menyebutkan bahwa setiap pertemuan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan orientasi dan sosialisasi PNPM-MP bidang Sarana Prasarana yang dilakukan di desa Merai Arai, dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat dibutuhkan dalam menyebarluaskan setiap informasi berkaitan dengan kebijakan publik. Menurut George C. Edwards III (1980) dalam Nawawi (2007:136-137) bahwa, "implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi". Komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh dalam proses sosialisasi setiap program yang akan dilaksanakan, agar dapat mencapai sasaran hendak seorang implementor memiliki sifat yang komunikatif.

2. Tahap Perencanaan Kegiatan PNPM-MP Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Perencanaan kegiatan PNPM-MP di desa Merah Arai meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di Kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai Musyawarah Antar Desa Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musyawarah desa perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Menurut Suwitri (2010: 1.9) “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan *input* yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan”.

Perencanaan kegiatan di Kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di Kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kabupaten.

a. Tahap persiapan dan sosialisasi

1). Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi.

Musyawarah Antar Desa merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan – kesepakatan

antar desa dalam melaksanakan PNPM-MP. Adapun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a). Disepakatinya mekanisme musyawarah antar desa termasuk terpilihnya ketua rapat, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah, dan penetapan anggota tim perumus.
- b). Disepakatinya waktu penyusunan detail desain dan Rencana Anggaran Belanja usulan kegiatan.
- c). Tersosialisasikannya rencana pembentukan Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di sebut UPK dan Badan Pengawas UPK beserta tugas dan kewenangannya.
- d). Tersusunannya rencana penggunaan Dana Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut DOK Perencanaan.

Peserta Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut MAD Sosialisasi yang dilaksanakan di ibu kota kecamatan Kayan Hulu adalah sebanyak 6 (enam) wakil dari setiap desa yaitu : Kepala Desa, 2 (dua) orang wakil dari BPD, 3 (tiga) orang tokoh masyarakat (sekurang-kurangnya 3 dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua desa di kecamatan. Dalam pelaksanaan MAD Sosilaisasi ini dihadiri oleh Camat dan Staf yang terkait, wakil instansi sektoral kecamatan maupun terbuka untuk anggota masyarakat lainnya.

Narasumber dalam pertemuan MAD Sosialisasi adalah tim koordinasi PNPM-MP Kabupaten, Camat dan Instansi tingkat kecamatan terkait. Sedangkan fasilitator pertemuan adalah : PjOK/PjAK, UPK dan FK/FT. Dokumen yang dihasilkan dalam

pertemuan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi ini adalah : Berita Acara yang menuangkan hasil-hasil keputusan musyawarah, jadwal musyawarah desa sosialisasi, dan rencana penggunaan Dana Operasional Kegiatan Perencanaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Trimanus kepala desa Merah Arai, penelitian dari pelaksanaan musyawarah antar desa ini, desa Merah Arai mengutus Kepala Desa Bapak Trimanus, BPD 2 orang, tokoh masyarakat 1 orang dan kelompok perempuan 2 orang.

2). Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Musyawarah Desa Sosialisasi di desa Merah Arai dilaksanakan di desa dengan di hadir oleh kepala desa dan seluruh aparat desa dan warga desa. Musyawarah desa sosialisasi ini merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPB-MP secara formal di desa. Adapun hasil yang diperoleh dari pertemuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a). Terpilihnya pengurus Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK, TPK terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- b). Tersosialisasikannya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi yang dilaksanakan diibukota kecamatan.
- c). Ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan PNPB-MP di desa.
- d). Dibentuk tim pemantau dari unsur masyarakat untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

- e). Dipilih dan ditetapkannya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPMD, KPMD dan kader teknik yang akan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM-MP.
- f). Disepakati dan ditetapkannya jadwal musyawarah desa perencanaan.
- g). Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi PNPM-MP dan media informasi lainnya.

Pelaksanaan Musyawarah Desa Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Desa dan aparat desa, Ketua dan anggota BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Wakil dari Rumat Tangga Miskin (RTM), Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan anggota masyarakat lainnya yang berminat. Fasilitator dalam musyawarah desa sosialisasi adalah fasilitator Kecamatan / Fasilitator Teknik atau PjOK.

Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta musyawarah desa sosialisasi adalah perempuan. Hasil pertemuan musyawarah desa sosialisasi ini adalah : Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa, Surat Pernyataan Kesanggupan desa untuk berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

3). Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat yang terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, kemudian mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ini merupakan anggota masyarakat mempunyai tugas untuk memandu serangkaian tahapan

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat.

b. Tahap Perencanaan Kegiatan di desa.

1). Penggalian Gagasan.

Penggalian gagasan adalah proses untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Tahap awal dari proses penggalian gagasan adalah mengadakan pertemuan di dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga dusun setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan dusun sebagai berikut :

a). Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial.

Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan rumah tangga di desa dalam kategori kaya, menengah dan miskin menurut kriteria dan istilah setempat. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga – rumah tangga yang ada di desa pada sebuah peta. Dalam proses ini, fasilitator harus mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin.

Langkah – langkah penentuan klasifikasi kesejahteraan sebagai berikut :

- (1). Masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana tingkatan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat selama ini, atau bagaimana mereka membedakan rumah tangga dalam komunitas desa mereka, misalnya ada rumah tang yang kaya, menengah dan miskin.

- (2). Masyarakat yang hadir dibagi menjadi 3 kelompok diskusi; kelompok diskusi tentang rumah tangga kaya, menengah dan miskin.
- (3). Masing-masing kelompok diminta membuat sebuah gambar yang menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya.
- (4). Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) partisipatif, masyarakat diminta untuk melakukan pemetaan RTM partisipatif untuk lebih menjabarkan kategori miskin dan sangat miskin. Pengertian pemetaan RTM partisipatif adalah merumuskan kriteria dan mengidentifikasi nama kepala keluarga, jumlah dan lokasi RTM dan sangat miskin di dusun. Tujuan dari pemetaan adalah mendapatkan kriteria dan baseline data RTM yang mendekati kenyataan tentang kelompok sasaran program.

Pendataan ini juga bermanfaat untuk digunakan sebagai aspek yang dominan dalam menentukan kelayakan usulan oleh tim verifikasi usulan. Kegiatan ini dilakukan di dusun dan difasilitasi oleh KPM-O/K dibawah supervisi Fasilitator Teknik. Kegiatan ini dilakukan dengan tahap, pertama : menggunakan alat penentuan kriteria dan kategori rumah tangga miskin dan sangat miskin, dan kedua : melakukan pemetaan berdasarkan kriteria dan kategori itu.

Setelah membuat klasifikasi tingkatan kesejahteraan, peserta pertemuan dusun difasilitasi untuk membuat peta sosial. Penyusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan dalam sebuah sketsa peta dusun/desa tentang kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum, dan potensi desa lainnya. Kegunaan peta sosial adalah sebagai alat bantu dalam : 1. menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah

tangga miskin, dan 2. melaksanakan dan memantau tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti penulisan usulan, verifikasi, musyawarah desa, dan musyawarah antar desa.

Sebelum musyawarah khusus perempuan, fasilitator kecamatan bersama kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan menggabungkan daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin berikut kriterianya, serta peta sosial hasil pertemuan dusun-dusun menjadi baseline desa tentang rumah tangga miskin dan sangat miskin, serta peta sosial dusun dan desa. Melengkapi peta sosial yang telah dibuat, selanjutnya adalah melakukan pemetaan lembaga-lembaga yang ada di dusun dan desa. Tujuan pemetaan lembaga desa adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan lembaga yang ada untuk sarana memecahkan masalah yang dihadapi serta mengoptimalkan potensi lingkungan yang dimiliki.

Dokumen yang diperoleh dari penyusunan kriteria rumah tangga miskin, pemetaan sosial dan pemetaan lembaga-lembaga di desa adalah : (1) Form kriteria dan kategori rumahtangga miskin dan sangat miskin, (2) form daftar kepala keluarga miskin dan sangat miskin, (3) peta / sketsa dusun dan (4) form diagram venn kelembagaan.

Hasil penelitian, bahwa pelaksanaan penentuan klasifikasi kesejahteraan dan pemetaan sosial ini dilaksanakan sendiri oleh warga dusun masing-masing yang difasilitasi oleh kepala desa dan aparat desa Merah Arai.

b). Musyawarah penggalian gagasan.

Musyawarah penggalian gagasan adalah pertemuan kelompok-kelompok / dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan

yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan.

Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalian gagasan adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau campuran) yang tergabung dalam: (1) ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah seperti RT, RK, RW, Dusun, Kampung, (2) Kelompok-kelompok informal di masyarakat seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, atau kelompok keagamaan, dan (3) Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai keadaan setempat.

Musyawarah penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahkan diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriteria, serta lembar diagram venn kelembagaan.

Hasil yang diperoleh dari pertemuan musyawarah penggalian gagasan adalah : dipahaminya hal-hal pokok tentang PNPM-MP meliputi tujuan, prinsip, ketentuan dasar, dan alur kegiatan PNPM-MP yang akan dilakukan dan gagasan-gagasan kegiatan maupun visi ke depan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. Pertemuan – pertemuan yang dilakukan menghasilkan dokumen sebagai berikut : Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah dan Daftar Gagasan.

2). Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP).

Musyawarah desa khusus perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan – gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan

kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa.

Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, lembar diagram venn kelembagaan, rekap hasil penggalian gagasan dari kelompok-kelompok perempuan. Hasil pertemuan musyawarah desa khusus perempuan diperoleh sebagai berikut: terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah antar desa prioritas usulan.

Metode yang digunakan dalam musyawarah desa khusus perempuan adalah analisis penyebab kemiskinan dengan tujuan sebagai berikut: mengajak perempuan mencari permasalahan penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis dan mencari akar permasalahannya, dan menentukan kegiatan apa saja yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahannya dari sudut pandang kelompok perempuan. Musyawarah desa khusus perempuan yang dilakukan itu menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut: Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah, Daftar Usulan, dan Daftar seluruh gagasan.

3). Musyawarah Desa Perencanaan.

Musyawarah desa perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap data RTM dusun, diagram venn

kelembagaan, rekap gagasan semua dusun, rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.

Musyawarah desa perencanaan ini diperoleh hasil sebagai berikut :

- a). Terumusnya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang berasal dari penggalian gagasan dan Musyawarah khusus perempuan.
- b). Tersusunnya peta sosial desa dan prioritas kegiatan dari hasil penggalian gagasan yang kemudian dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan desa (RKPDes) dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDes).
- c). Berdasarkan tabel penggalian gagasan, menetapkan satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi.
- d). Berdasarkan tabel penggalian gagasan MKP, mengesahkan tanpa pembahasan kembali, usulan kegiatan hasil keputusan musyawarah khusus perempuan
- e). Ditetapkannya daftar usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaanya, Usulan ini dapat disampaikan melalui musyawarah rencana pembangunan desa dan musyawarah antar desa tahap selanjutnya.
- f). Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara.
- g). Terpilihnya sekurang-kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus UPK dan calon pengamat pada musyawarah antar desa prioritas usulan.
- h). Terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan terdiri dari 6 orang meliputi Kepala Desa, Ketua TPK, dan 4 orang wakil masyarakat. Minimal 3 dari 6 wakil tersebut adalah perempuan.

- i). Disetujuinya keikutsertaan desa dalam pembentukan BKAD yang tertuang dalam surat keputusan yang ditanda tangani oleh BPD dan Kepala Desa.

Musyawarah desa perencanaan dalam pelaksanaan dihadiri oleh peserta sebagai berikut : yaitu Kepala Desa dan aparat desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil Rumah Tangga Miskin, Wakil Perempuan, Ormas, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama serta masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Proses ini difasilitasi oleh Kader desa dan atau FK/FT, fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta musyawarah desa perencanaan adalah perempuan.

Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa perencanaan berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat. Setelah musyawarah desa perencanaan, segera dilanjutkan dengan penulisan usulan dan perumusan dokumen RPJMDes dan RPT Des. Pertemuan musyawarah desa perencanaan ini menghasilkan dokumen sebagai berikut : Berita Acara Hasil Musyawarah, Peta Sosial Desa, Visi Desa, Surat Keputusan Kepala Desa Membentuk BKAD, dan Daftar Usulan Kegiatan Desa.

4). Penulisan Usulan Desa

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diadukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh tim penulis usulan yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan usulan

TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik Kecamatan.

Hasil yang diperoleh dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan keputusan musyawarah desa perencanaan yang akan diajukan ke Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musyawarah perencanaan pembangunan reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Dalam penyusunan dokumen-dokumen untuk musrenbang reguler, Tim Penulis Usulan merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan dan bekerjasama dengan perangkat pemerintah desa.

Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAP).

Hasil penelitian pelaksanaan PNPB-MP bidang Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan, menunjukkan bahwa pemahaman prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan harus dipahami oleh seorang implementor. Pelaksanaan perencanaan tidak terlepas dari metode atau standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edwards III (1980) dalam Nawawi (2007: 37) bahwa "Sumber daya, dalam mengimplementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya material maupun sumber daya metode".

Selanjutnya menurut Nawawi (2009: 132-133) mengemukakan bahwa implementasi suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut :

1. Organisasi : Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi : Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan : Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Pendapat ahli di atas, yang menyebutkan sumber daya metode merupakan pedoman dalam melaksanakan perencanaan kegiatan.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP Mendorong Swadaya Masyarakat Desa

Pelaksanaan kegiatan PNPM-MP adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana.

Menurut Hogowood dan Gunn (1978) yang dikutip Nugroho (2009: 630) kedua pakar ini mengemukakan bahwa, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembag/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.

2. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling kebergantungan kecil.
7. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada persiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, tim pengelola kegiatan, unit pelaksana kegiatan, dan seluruh pelaku PNPM-MP lainnya. Karena itu TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM-MP. Pelatihan UPK, BP-UPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

a. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

1). Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan.

Rapat koordinasi di kecamatan ini difasilitasi oleh pendamping lapangan, fasilitator dan Penanggungjawab Operasional Kecamatan. Rapat dihadiri oleh pengurus Unit Pelaksana Kecamatan, Kepala Desa, dan Tim Pengelola Kegiatan setiap desa penerima dana PNPM-MP. Waktu penyelenggaraan rapat, diharapkan tidak lebih dari satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi TPK dan UPK.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini diperoleh hasil sebagai berikut :

- a). Disepakati mekanisme koordinasi dan rapat-rapat lain selama periode pelaksanaan,
 - b). Penyamaan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada di kecamatan terhadap pelaksanaan program, termasuk dalam hal evaluasi dan pelaporan,
 - c). Terjadi tukar pendapat dan pemberian saran antar desa terhadap rencana setiap desa,
 - d). Dibahas dan disepakati tentang mekanisme penyelesaian kendala dan masalah yang muncul.
- 2). Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa.

Pengurus Tim Pengelola Kegiatan bersama Kepala Desa secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya.

Pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan di desa ini diperoleh hasil – hasil sebagai berikut :

- 1). Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM-MP di desa,
- 2). Menyusun rencana kerja detail termasuk pendadwalannya, seperti pembuatan contoh dan trial pekerjaan,
- 3). Disepakati jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan.

b. Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di desa Merah Arai adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan Musyawarah Antar Desa penetapan usulan dan musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut :

- 1). Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat.
- 2). Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi RTM,
- 3). Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan.

Hasil penelitian pelaksanaan kegiatan fisik yaitu membangun gedung serbaguna semua dapat dilaksanakan oleh warga desa Merah Arai sendiri dan melibatkan rumah tangga miskin yang diprioritaskan oleh warga lain dengan memberikan pinjam peralatan tukang dan alat-alat lain yang diperlukan.

Pelaksanaan penyaluran dana kegiatan yang di danai oleh PNPM-MP adalah sebagai berikut :

- 1). Penyaluran Dana.

Penyaluran dana bantuan PNPM-MP, mengikuti proses dan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

2). Pengadaan Tenaga Kerja.

Tim pengelola kegiatan mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi RTM. Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja mengisi format pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja, akan tetapi boleh mendaftarkan diri sampai pelaksanaan selesai.

3). Pengadaan Bahan dan Alat

Proses pengadaan bahan dan alat dalam PNPM-MP dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan. Atas persetujuan masyarakat, TPK menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap tindakannya kepada masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat dan papan informasi.

Pengadaan bahan dan alat senilai atau kurang dari Rp. 15 juta, TPK harus melakukan survei harga minimal kepada 3 (tiga) toko penyedia dan menentukan toko penyedia mana yang dipilih berdasarkan harga termurah dengan kualitas dan spesifikasi sesuai yang direncanakan. Hasil survey dan penentuan toko penyedia mana yang dipilih harus disampaikan dalam forum pertemuan masyarakat dan papan informasi.

Pengadaan bahan dan alat dengan nilai di atas Rp. 15 juta, TPK menyelenggarakan proses penawaran harga atau pelelangan yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia bahan dan alat. Jika ternyata hanya 1 (satu) dari beberapa penyedia mengikuti penawaran yang mendekati anggaran, sementara yang lainnya jauh dari harga yang dianggarkan, fasilitator perlu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana dan atau kolusi dalam pengadaan bahan dan alat tersebut.

4). Rapat Evaluasi Tim Pengelola Kegiatan.

Pelaksanaan rapat evaluasi tim pengelola kegiatan dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan).

Pelaksanaan rapat evaluasi tim pengelola kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a). Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana pelaksanaan yang sudah dibuat,
 - b). Adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan,
 - c). Evaluasi kinerja setiap pengurus tim pengelola kegiatan,
 - d). Tersusunnya laporan penggunaan dan (LPD),
 - e). Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya.
- c. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.**

Pelaksanaan musyawarah desa pertanggungjawaban di desa Meerah Arai ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh tim pengelola kegiatan kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM-MP tahap pertama dan tahap kedua.

Pelaksanaan musyawarah desa pertanggungjawaban diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1). Penyampaian laporan dari TPK tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan perempuan dan RTM,
- 2). Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari TPK, berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan,
- 3). Evaluasi terhadap kinerja TPK serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya,
- 4). Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat.
- 5). Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya,
- 6). Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

Fasilitator dalam musyawarah desa pertanggungjawaban adalah fasilitator kecamatan fasilitator teknik kecamatan atau PjOK. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta musyawarah desa pertanggungjawaban adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa berasal dari Dana Operasional Kegiatan, Swadaya desa atau masyarakat.

Dokumen yang dihasilkan dari musyawarah desa pertanggungjawaban ini adalah Berita Acara Hasil Musyawarah dan Rencana kerja periode berikutnya.

d. Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan dari PNPM-MP harus didokumentasikan oleh fasilitator kecamatan/fasilitator teknik kecamatan. Meskipun demikian, untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan.

Pada akhir periode pelaksanaan PNPM-MP, FK/FT-Kec. Harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan :

- 1). Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM-MP di Kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa penerima PNPM-MP, namun sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada. Tetapi tidak boleh hanya foto dari satu desa saja.
- 2). Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
- 3). Foto yang ditampilkan meliputi :
 - a). Foto kondisi 0%, 50% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.
 - b). Foto yang memperlihatkan orang yang sedang bekerja secara beramai-ramai.
 - c). Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana.
 - d). Foto yang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung kepada masyarakat.

e. Penyelesaian Kegiatan.

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di desa.

Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, meliputi :

1). Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (9100%) serta siap diperiksa oleh PjOK.

2). Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)

Realisasi kegiatan dan biaya merupakan penjelasan apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta penggunaan dana bantuan PNPM-MP di desa, TPK dan KPMD yang dibantu oleh FK/FT-Kec. harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya.

3). Musyawarah Desa Serah Terima.

Musyawarah desa serah terima merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat.

Surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K) disahkan setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah desa tersebut. Hasil pertemuan musyawarah desa serah terima ini menghasilkan diantaranya yaitu; serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan, serta ditetapkannya tim operasional dan pemeliharaan dan ditetapkannya rencana

pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah diserahkan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.

Pertemuan tersebut di atas menghasilkan dokumen – dokumen sebagai berikut :
Berita Acara Hasil Musyawarah dan Lampiran Pendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

4). Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).

Pelaksanaan PNPM-MP di desa dinyatakan selesai jika telah diserahkan kepada masyarakat dalam musyawarah desa serah terima dan setelah ditandatangani SP3K oleh ketua TPK dan PjOK serta diketahui oleh Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati.

5). Pembuatan Dokumen Penyelesaian.

Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K). Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) , rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya.

Tahapan pelaksanaan PNPM-MP di desa Merah Arai terungkap dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan pihak yang melaksanakan langsung dilapangan yaitu:

Menurut Bapak Atoi selaku PjOK mengatakan:

”bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP sudah ada pedoman dan petunjuk – petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan yang berkaitan dengan dana sudah petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, jadi unit pelaksana hanya mematuhi aturan-aturan yang telah ada, sehingga pelaksanaan program sudah termasuk ada SOP.

Menurut ketua UPK yaitu Bapak Obetianus, S.Pd mengatakan :

”bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di setiap desa sudah dibentuk pengurus dengan nama TPK sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh petunjuk dan pedoman pelaksana PNPM-MP, dengan demikian untuk melaksanakan kegiatan secara aturan sudah tidak masalah, asal setiap pelaksana dan petugas memahami aturan yang telah ada, dan tahapan-tahapanpun sudah jelas dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya, sudah ada format laporan.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan kegiatan PNPM-MP mendorong swadaya masyarakat desa, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap program diperlukan petunjuk atau pedoman harus dipatuhi oleh setiap pelaksana lapangan. Petunjuk atau pedoman yang sering disebut dengan standar operasional prosedur (SOP) merupakan faktor pendukung dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, agar dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien maka diperlukan petunjuk pelaksana baik berbentuk struktur birokrasi agar ada pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas masing-masing personal. Senada dengan pandangan Edward III (1980) dalam Nawawi (2007:138):

Bahwa Struktur Birokrasi, Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi –posisi itu dibingkai untuk menunjukan interaksi formal yang ditetapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hierakhi yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi”.

Hasil dari wawancara beberapa orang diatas dan mengutip pendapat para ahli maka, implementasi PNPM-MP di desa Merah Arai dapat dilaksanakan dengan baik sangat didukung oleh perangkat aturan yang telah jelas dan dapat dipahami setiap implementor dilapangan. Perangkat aturan tersebut adalah Pedomanan PNPM-MP yang menjadi SOP dalam organisasi.

4. Tahapan Pelestarian Kegiatan PNPM-MP Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa

Pelestarian kegiatan adalah pengelolaan kegiatan PNPM-MP harus di jamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, system dan proses perencanaan, aspek *good govermance*, serta prinsip-prinsip PNPM-MP harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal – hal itu maka semua pelaku PNPM-MP harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-MP secara benar.

a. Hasil Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di desa Merah Arai yang berupa sarana prasarana, yaitu bangunan gedung serbaguna, merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan.

Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan PNPM-MP tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapatkan dana PNPM-MP untuk tahun berikutnya.

b. Proses Pelestarian.

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM-MP.

Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1). Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip PNPM-MP dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat.
- 2). Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat bidang pendidikan – kesehatan, serta pengembangan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan kemampuan masyarakat sendiri.
- 3). Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat.
- 4). Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan program.
- 5). Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

c. Komponen Pendukung Pelestarian.

- 1). Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku lain PNPM-MP di desa Merah Arai dan kecamatan Kayan Hulu.

- 2). Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedangkan berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan,
- 3). Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa, termasuk lembaga pengelola prasarana/sarana.

Selama tahap pelestarian peran kader desa dan teknik secara berkelanjutan sangat diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih pengetahuan dan ketrampilan dari para fasilitator.

d. Sistem Pemeliharaan.

Sistem pemeliharaan PNPM-MP di desa Merah Arai diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1). Rencana pemeliharaan sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan. Tim Pemelihara segera dibentuk dan dilatih paling lambat setelah Musyawarah antar desa penetapan usulan. Tim pemelihara selanjutnya dilibatkan dalam memantau pekerjaan yang dilakukan oleh TPK.
- 2). Untuk setiap jenis prasarana tertentu, telah dibuat daftar penanggungjawab dan penetapan iuran.
- 3). Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan.

- 4). PjOK akan libatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin.
- 5). Pada dokumen penyelesaian harus sudah disediakan garis besar rencana pemeliharaan yang diwajibkan sebagai lampiran SP3K.

e. Pelatihan Pemeliharaan.

Pelatihan pemeliharaan di desa Merah Arai oleh fasilitator kecamatan dibantu oleh fasilitator kabupaten wajib memberikan pelatihan kepada anggota tim pemeliharaan atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai. Dalam pelatihan tersebut masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan, dan teknik-teknik yang digunakan seperti : teknik membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya.

Pelaksanaan Pelestarian kegiatan dapat diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Kepala Desa Merah Arai yaitu Bapak Trimanus:

”Bahwa pelaksanaan pelestarian dilakukan rapat pemilihan orang-orang yang akan diberikan pelatihan untuk menjadi tim pelestarian dan sekaligus untuk memberdayakan lembaga-lembaga yang telah dibentuk baik pada pelaksanaan PNPM-MP maupun kelembagaan yang sudah ada, berupa kelompok kerja, kelompok tani dan kelompok keagamaan yang dapat memberdayakan masyarakat dalam proses memandirikan orang-orang miskin”.

Pelaksanaan penguatan kelembagaan yang ada di desa Merah Arai terungkap hasil wawancara peneliti dengan ketua Badan Pengawasan Desa yaitu Bapak Segalanius, beliau mengatakan bahwa ” penguatan kelembagaan dilakukan dengan tetap memakai dan memfungsikan atau memberdayakan lembaga-lembaga yang sudah terbentuk seperti kelompok tani, kelompok kerja dan kelompok – kelompok lain untuk setiap ada kegiatan

baik gotong royong maupun kegiatan lainnya selalu menggunakan kelompok yang sudah ada”.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan tahap pelestarian kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemantauan dan pengawasan serta penguatan kelembagaan masyarakat desa ini telah mampu memberdayakan kelembagaan yang telah dibentuk. Dengan demikian kebijakan PNPM-MP sudah dapat berdampak dengan masyarakat desa, hal tersebut dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan sudah dapat diserap dan dilaksanakan. Namun masih terdapat kekurangan disana sini, perlu program – program serupa untuk dapat diimplementasikan di desa Merah Arai. Indikator telah berjalannya prinsip-prinsip PNPM-MP adalah masyarakat terus menerus menggunakan prinsip pemberdayaan dan serta dapat memanfaatkan hasil dari kegiatan PNPM-MP serta penggunaan sarana dan prasarana yang dibangun melalui kegiatan PNPM-MP.

5. Tahapan Pengendalian Kegiatan PNPM-MP.

Pengendalian PNPM-MP di desa Merah Arai dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan:

- a. Menjaga setiap proses PNPM-MP desa Merah Arai selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan PNPM-MP,
- b. Menjaga bahwa hasil –hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,

- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
- e. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM-MP Merah Arai agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM-MP dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian PNPM-MP adalah sebagai berikut :

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pelaku PNPM-MP disemua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah.
- c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan.
- e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakan aturan dengan pemberian sanksi.

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM-MP, melihat kinerja semua pelaku PNPM-MP, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM-MP termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PNPM-MP dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku PNPM-MP, yaitu : masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain. Hasil wawancara dengan ketua BPD desa Merah Arai Bapak Segalanius, menyatakan bahwa "pengawasan hanya dilakukan pada saat penyampaian laporan pemakaian dana yang sudah terpakai dan saat pembayaran pada saat kerja", ini menunjukkan pengawasan masih lemah dari unsur masyarakat di desa Merah Arai.

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan PNPM-MP di desa Merah Arai, dapat diperoleh selain dari dokumen-dokumen bentuk pertanggungjawaban dari TPK dapat diperoleh dari hasil wawancara peneliti.

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai, "mengatakan bahwa pemantauan dan pengawasan pelaksanaan PNPM-MP di desa kami ini dilakukan oleh tim yang telah dibentuk dalam rapat perencanaan, tim ini bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan PNPM-MP, saya rasa sudah berjalan dengan baik, sebab bangunan yang direncanakan sudah terbangun.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan tahap pengendalian kegiatan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian dilaksanakan mulai dari pelaksanaan kegiatan sehingga berakhir kegiatan, dalam bentuk penyampaian laporan pemakaian dana dan bukti pembayaran. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan di desa Merah Arai sudah melibatkan unsur masyarakat desa, hal ini diungkapkan oleh Ibu Mariani selaku Sekretaris Desa Merah Arai, beliau mengatakan "bahwa pemantauan dan pengawasan dibentuk berdasarkan hasil rapat desa dan rapat pelaksanaan PNPM-MP dengan memilih orang-orang yang dianggap mampu dan mempunyai keseriusan untuk melakukan pengawasan".

Berdasarkan wawancara dari beberapa orang yang penelitian anggap mempunyai kapasitas dan dari data berupa bentuk bangunan yang telah terbangun, dapat disimpulkan bahwa implementasi PNPM-MP dalam proses pemantauan dan pengawasan telah berjalan dengan baik dan masing-masing unit sudah melaksanakan tugasnya.

C. Analisis faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP di desa Merah Arai.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan, yang menghasilkan suatu pengertian kedua belah pihak. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik secara langsung, secara lisan maupun tak langsung melalui media (Efendy 1993: 45). Berdasarkan pandangan tersebut, maka oleh Pace dkk (1998: 56) bahwa komunikasi memiliki unsur : 1) Komunikator, 2) komunikan, 3) pesan, 4) unit penerima dan pengirim 5) proses 6) adanya tujuan atau efek tertentu.

Dalam penelitian ini komunikasi merupakan suatu bentuk menyampaikan informasi dari program PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu. Proses implementasi dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengawasan merupakan tahapan-tahapan yang perlu dikomunikasikan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program. Pelaksanaan kebijakan PNPM-MP di desa Merah Arai melalui tahapan-tahapan, dalam tahapan tersebut memerlukan komunikasi antara *implementor dan target group* yang memerlukan suatu pemahaman yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efisien, efektif, tepat sasaran, bermanfaat dan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.

Faktor komunikasi disini merupakan bentuk proses implementasi yang dilakukan setiap pelaksana melakukan koordinasi antar pelaksana, menyusun strategi

dan rencana yang akan dilaksanakan, proses pelaksanaan dan tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

Komunikasi, menurut Nawawi (2007:137-138) bahwa implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu (1) penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasan (2) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan dan (3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

Pendapat pakar diatas merupakan suatu bentuk proses pelaksanaan kebijakan yang perlu dikomunikasikan dengan baik kepada kelompok sasaran kebijakan publik. Adapun bentuk komunikasi yang harus dilaksanakan adalah :

- a. Penyaluran yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasan.

Penyaluran merupakan proses sosialisasi dengan menginformasikan suatu kebijakan publik yang akan dilaksanakan pada kelompok masyarakat, dimana masyarakat merupakan kelompok yang menerima manfaat. Jika dalam menyampaikan informasi dapat dengan jelas maksud dan tujuan, maka akan diterima dan direspon oleh masyarakat.

Proses komunikasi yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat dilihat dari hasil penerimaan masyarakat terhadap program PNPM-MP ini dapat berjalan dan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan

Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan merupakan syarat mutlak seorang implementor kebijakan. Pelaksanaan kebijakan PNPM-MP di desa Merah Arai sangat diperlukan dari para implementor dalam menjelaskan program yang akan dilaksanakan, agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

Proses komunikasi yang dilakukan oleh implementor dapat dilihat dari berbagai dokumentasi rapat yang dilaksanakan oleh TPK dan pelaksanaan PNPM-MP lainnya, serta pemahaman masyarakat tentang PNPM-MP serta manfaat dari program tersebut.

c. Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan

Konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan syarat mutlak proses mengkomunikasikan kebijakan kepada kelompok sasaran. Konsistensi merupakan bentuk informasi dari program kebijakan publik yang akan dilaksanakan.

Proses implementasi PNPM-MP di desa Merah Arai melalui tahapan sosialisasi dengan mengkomunikasikan program ini, dapat dilihat dari dokumen-dokumen rapat dan hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Faktor Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud di sini adalah PNPM-MP bidang sarana prasarana yang dilaksanakan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu. Sumberdaya dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang berpengaruh dalam pelaksanaan program pemerintah. Sumberdaya adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan orang atau kelompok orang, bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan pedoman teknis maupun administrasi yang menjadi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan baik fisik maupun administrasinya.

a. Sumber daya manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Alwi (2001: 6) dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering juga disebut karyawan atau *employee*.

Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah personil-personil PNPM-MP yang diberikan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan PNPM-MP bidang sarana dan prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu. Personil-personil dimaksud adalah para pelaku PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di Kecamatan Kayan Hulu

dan khususnya di desa Merah Arai. Pelaku-pelaku yang berada di kecamatan adalah ketua unit pengelola kegiatan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, fasilitator kecamatan, fasilitator teknik kecamatan dan pendamping lokal, selain pelaku di kecamatan juga ada pelaku di tingkat desa yaitu ketua tim pengelola kegiatan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, kader pemberdayaan masyarakat desa

Menurut Bapak Trimanus yaitu kepala desa Merah Arai, mengatakan bahwa “ di desa Merah Arai ini sulit untuk menunjuk orang yang bersedia dan mampu untuk menjadi pelaku PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana, kebanyakan alasannya tidak memiliki pendidikan yang layak dan ketrampilan lainnya, seperti ketik menetik dan pembukuan serta administrasi yang berkaitan dengan PNPM-MP bidang Sarana Prasarana”. Senada juga yang diungkapkan oleh ketua TPK PNPM-MP desa Merah Arai, yaitu Sujatmiko, menyatakan bahwa “mencari orang yang bisa berurusan ke kecamatan dan yang mau hilir mudik untuk mengurus program PNPM-MP ini sangat sulit”.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dari segala bentuk program baik program pemerintah maupun dari pihak swasta lainnya. Kualitas sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam pelaksanaan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai, hal ini dapat di lihat dari partisipasinya di dalam berbagai kegiatan yang membutuhkan syarat-syarat tertentu, terutama syarat yang berpendidikan formal menengah atas. Sumber daya manusia di desa Merah Arai tergambar pada tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk, menggambarkan bahwa desa ini tergolong desa yang

masih tertinggal dibidang sumber daya manusia yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi.

Analisis penulis yang beranjak dari hasil wawancara dan data yang ada, maka dapat berkesimpulan bahwa belum terlaksana dengan efektif PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai sangat erat hubungannya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, baik kualitas maupun kuantitas. Hubungan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan indikasi sementara bahwa pelaksanaan PNPM-MP bidang Sarana Prasarana di dominasi oleh aparat desa, sebab masyarakat dari rumah tangga miskin masih menyerahkan kegiatan ini untuk dilaksanakan oleh aparat desa dan orang-orang yang dianggap memiliki akses di ibu kota kecamatan.

Nawawi (2007: 136) menyatakan bahwa: Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metode. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

b. Sumber daya material

Sumber daya material merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa yang merupakan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai. Sumber daya material dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembangunan gedung

serbaguna di desa Merah Arai. Bahan-bahan tersebut adalah semen, seng, paku, simpai dan material lainnya.

Menurut ketua TPK PNPM-MP desa Merah Arai, yaitu Bapak Sujatmiko “material yang dibutuhkan seperti semen, seng, paku, simpai dan lain masih diperoleh dari ibukota kecamatan tetangga yaitu Nanga Mau ibu kota kecamatan Kayan Hilir. Dengan demikian kesulitan kami untuk memperoleh material ini, sehingga pelaksanaan mengalami keterlambatan, sebab menunggu material datang, keterlambatan material ini karena air sungai kayan surut, sulit dilewati sampai besar yang membawa bahan-bahan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua tim pengelola kegiatan di desa Merah Arai ini dapat disimpulkan bahwa material faktor yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan PNPM-MP di desa Merah Arai dan ditambah lagi akses menuju desa ini masih menggunakan jalur sungai dengan biaya tinggi dan air sungainya sangat fluktuatif, sehingga terjadi keterlambatan dan tidak tepat waktu sesuai dengan perencanaan awal.

Nawawi (2007: 136) menyatakan bahwa: Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metode. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

c. Sumber daya metode

Sumber daya metode dalam penelitian ini adalah pedoman teknis dan administrasi yang dijadikan petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan kegiatan fisik dan administrasi program PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai.

Metode adalah system operasional prosedur (SOP) atau langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh setiap pelaksana, baik pelaksanaan fisik bangunan maupun pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban kegiatan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai. Sumber daya metode juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam melaksanakan kegiatan, jika tidak ada pedoman atau petunjuk maka suatu program tidak dapat dilaksanakan, hanya berupa program di atas kertas.

Menurut ketua TPK PNPM-MP desa Merah Arai menyatakan bahwa "kami bekerja berdasarkan petunjuk dan pedoman yang disediakan oleh UPK dan PjOK yang ada di kecamatan, pedoman itu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan selalu berpedoman pada petunjuk tersebut". Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya metode ini merupakan faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP bidang sarana dan prasarana di desa Merah Arai.

Nawawi (2007: 136) menyatakan bahwa: Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metode. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

3. Faktor Disposisi.

Disposisi atau sikap implementor sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan, agar mendapat manfaat dan tujuannya. Disposisi pelaku PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana sangat

menentukan efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan, oleh sebab itu seorang implementor harus mempunyai sikap dan karakter yang bersahaja dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang dipedomaninya.

Disposisi pelaku PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana dituntut untuk mampu bekerja dengan iklas dan tuntas, agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dari program yang memberdayakan masyarakat miskin di desa, terutama rumah tangga miskin berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama pada saat penggalan gagasan potensi desa. Disposisi merupakan watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor, apabila seorang implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Implementor harus mempunyai sikap seperti berikut: yaitu komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan demokratis.

a. Komitmen

Komitmen dalam penelitian ini adalah kepatuhan dari implementor terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ada, serta hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan kegiatan. Bansal, Irving dan Taylor (2004:5) mendefinisikan “komitmen sebagai kekuatan yang mengikat seseorang pada suatu tindakan yang memiliki relevansi dengan satu atau lebih sasaran”.

Komitmen para pelaku PNPB-MP sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, sebab semua pelaksanaan program yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk kegiatan yang memberikan manfaat dan untuk mengubah kondisi masyarakat dalam mengembangkan diri dan kelompoknya agar lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah yang dilaksanakan di masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai efektif dan efisien dari program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, maka perlu adanya pelaksana. Pelaksana yang dimaksud disini adalah implementor, seorang implementor sangat berpengaruh sekali dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Desa Merah Arai, beliau mengatakan bahwa “ pendamping lapangan PNPB-MP yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dalam melakukan bimbingan, baik bimbingan teknik maupun bimbingan administrasi kegiatan sering tidak tepat waktu untuk berkunjung ke desa kami, sehingga para pelaku yang ada di desa kami sering mencari pendamping di ibu kota kecamatan.

Pernyataan kepala desa di atas menggambarkan bahwa seorang implementor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan suatu kegiatan sangat berpengaruh sekali dengan proses pelaksanaan program. Tidak jarang di masyarakat seorang pelaksana yang ditunjuk dan diberi tanggungjawab merupakan orang – orang yang dianggap mampu dan pintar. Sehingga sangat ketergantungannya pada pendapat orang-orang yang dianggap mampu dan berpengetahuan. Implementor juga tidak cukup hanya mampu dan memiliki pengetahuan saja, sebab sikap dan karakter juga dituntut untuk menjadi panutan, oleh sebab itu komitmen seorang implementor sangat ditunggu dan dinantikan oleh masyarakat.

Nawawi (2007: 137) menyatakan bahwa :

Disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Analisa peneliti disini bahwa komitmen seorang implementor sangat berpengaruh sekali terhadap implementasi suatu program atau kebijakan pemerintah. Suatu program akan terlaksana sesuai dengan sasaran jika seorang implementor dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan mempunyai kerja yang ikhlas dan tuntas, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hasil kerja. Dengan demikian komitmen sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Kejujuran

Kejujuran dalam penelitian ini adalah sifat dan karakter yang dimiliki oleh seorang implementor dalam menyampaikan informasi dan program yang berkaitan dengan kebijakan. Menurut Julius HR (2010: 4) Kata jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Bila seseorang berhadapan dengan suatu atau fenomena maka seseorang itu akan memperoleh gambaran tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Bila seseorang itu menceritakan informasi tentang gambaran tersebut kepada orang lain tanpa ada “perubahan” (sesuai dengan realitasnya) maka sikap yang seperti itulah yang disebut dengan jujur.

Pelaksanaan suatu program dibutuhkan seorang implementor yang mempunyai sikap dan karakter yang bisa dipercaya, memiliki integritas dan sifat yang baik. Kejujuran seorang implementor merupakan faktor yang sangat berpengaruh sekali terhadap penilaian dan respon dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari program yang diluncurkan oleh pemerintah. Kejujuran yang dibutuhkan adalah kemampuan seorang implementor untuk menyampaikan apa adanya yang di programkan oleh pemerintah serta proses yang harus dijalankan sesuai dengan mekanisme dan metode yang telah ditetapkan. Mekanisme dan metode yang telah ditetapkan harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, agar tidak terjadi penyimpangan dan menimbulkan kecurigaan pihak tertentu dan terjadinya diskomunikasi yang mengakibatkan tidak berjalan dengan baik. Kejujuran dalam menggunakan anggaran yang menjadi sangat penting dalam proses pembiayaan suatu kegiatan.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu bapak Iyonedri ” menyatakan bahwa para pelaku yang dimaksud para pelaku disini yaitu ketua TPK dan perangkatnya harus dapat menyampaikan laporan penggunaan keuangan kegiatan kepada masyarakat sesuai dengan pengeluaran dan biaya-biaya dikeluarkan oleh tim, untuk keperluan biaya operasional dan biaya material serta biaya tenaga kerja. Untuk desa kami sudah dapat berjalan cukup baik dan ketua juga cukup terbuka dalam penggunaan dana yang ada, serta sebelum melakukan kegiatan dan pembayaran diadakan pertemuan dan membahas serta menjelaskan pengeluaran.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa kejujuran seorang implementor sangat menentukan sekali dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yaitu untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengurangi rumah tangga miskin di desa

Merah Arai sangat ditentukan oleh seluruh komponen yang terlibat. Kejujuran merupakan faktor yang sangat berpengaruh sekali terlaksananya suatu program secara efektif dan efisien serta mempunyai manfaat di masyarakat sasaran.

Nawawi (2007: 137) menyatakan bahwa :

Disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

c. Komunikatif

Komunikatif dalam penelitian ini adalah karakter dan kemampuan seorang implementor dalam berkomunikasi dengan semua pelaku yang terlibat. Kejelasan informasi yang disampaikan agar setiap program yang akan dilaksanakan dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan dan konsistensi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Kebijakan akan terimplementasikan secara efektif dan efisien apabila dapat dipahami setiap pihak yang terlibat, baik sebagai implementor kebijakan maupun target group dari kebijakan. Implementor dalam pelaksanaan kegiatan merupakan sumber informasi yang harus dapat disampaikan kepada masyarakat dengan baik, serta mampu mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan agar mendapat respon atau tanggapan. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam berbagai proses kegiatan yang

akan dilaksanakan, di desa Merah Arai dengan kondisi masyarakat yang belum semua dapat berbahasa Indonesia dengan baik, maka perlu penjelasan yang sangat mendetil kepada warga masyarakat agar setiap program dapat dipahami dan direspon agar tujuan dari program itu dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Implementor sangat dituntut dapat berkomunikasi dengan baik dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh komunikatifnya seorang implementor dalam menyampaikan dan menerima berita atau informasi yang harus diketahui baik untuk implementor sendiri maupun masyarakat sasaran. Para pelaku PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu merupakan orang-orang sudah mendapatkan pelatihan sebelum melakukan kegiatan di lapangan, sehingga kemampuan dan pengetahuan sudah cukup bagus dan sudah saling berkoordinasi antara para pelaku.

Pernyataan dari Sekretaris Desa Merah Arai menyebutkan bahwa “para pelaku PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai ini cukup jelas menyampaikan informasi program melalui sosialisasi sebelumnya dan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Buktinya selama program ini hampir tidak ada kendala yang berarti, yang disebabkan oleh penyampaian dan penerimaan perintah dari petugas PNPM-MP di desa ini. Dengan terbangunnya gedung serbaguna yang setiap saat dipakai masyarakat untuk bermusyawarah dan rapat-rapat desa.

“Dalam proses perencanaannya juga sudah melalui musyawarah dan atas kesepakatan bersama dengan masyarakat disini. Para pelaku PNPM-MP bidang sarana dan prasarana di desa Merah Arai ini cukup baik dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sesama pelaku PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa faktor komunikatif sangat berpengaruh sekali dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan. Tidak bisa kita bayangkan jika

informasi yang disampaikan dari implementor kepada masyarakat tidak dapat dimengerti oleh masyarakat dan sebaliknya keinginan masyarakat tidak dapat dimengerti oleh seorang implementor. Hal demikianlah yang akan menjadi sumber diskomunikasi atau ketidak sinkronnya setiap program yang akan dilaksanakan, sehingga menimbulkan berbagai program yang gagal dan tidak tepat sasaran.

Nawawi (2007: 137) menyatakan bahwa :

Disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

d. Cerdik

Cerdik dalam penelitian ini adalah kemampuan seorang implementor dalam menentukan strategi dan teknik dalam memilih dan menentukan suatu langkah dalam mengambil suatu keputusan untuk dilaksanakan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Cerdik adalah merupakan kemampuan mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan orang lain yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok.

Nawawi (2007: 137) menyatakan bahwa :

Disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Pemahaman dari makna cerdas ini adalah kecepatan proses berfikir, ketepatan atau akurasi keputusan dan tindakan yang diambil. Akurasi keputusan harus didukung dengan pemilihan metodologi yang cocok untuk itu. Terakhir adalah keuntungan atau manfaat yang diperoleh memuaskan. Kecerdikan seorang implementor sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan setiap program. Sikap cerdas seorang implementor sangat berpengaruh terhadap implementasi suatu program yang diluncurkan oleh pemerintah. Cerdik dibutuhkan pada saat menemui kendala-kendala yang membutuhkan suatu kebijakan dan tindakan untuk segera diambil dalam rangka memecahkan suatu masalah. Dengan demikian sikap cerdas seorang implementor sangat berpengaruh sekali terlaksananya kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien baik waktu, tenaga maupun dana.

e. Demokratis

Demokratis dalam penelitian ini adalah kemampuan dari implementor dalam melaksanakan suatu kegiatan menerima saran atau kritik serta menampung aspirasi dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari program. Sikap demokratis adalah sikap yang sangat diperlukan dalam menjalankan suatu kebijakan, suatu program akan didukung oleh semua pihak apabila setiap aspirasi dari berbagai komponen masyarakat dapat diserap dan ditampung. Untuk semua aspirasi dapat diserap dan ditampung maka sikap demokratis seorang implementor sangat dibutuhkan. Pelaksanaan PNPM-MP

bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai merupakan hasil musyawarah dan mufakat perencanaan yang menyerap berbagai aspirasi yang ada dimasyarakat.

Sikap demokratis seorang implementor dapat dilihat dari beberapa hasil kesepakatan yang menjadi suatu usulan perencanaan, yang kemudian menjadi dokumen dalam rangka proses pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. Kegiatan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ada maka perlu adanya dukungan semua pihak. Dukungan akan berjalan baik, jika adanya saling melengkapi dan dan memberikan sumbang dan saran.

Nawawi (2007: 137) menyatakan bahwa :

Disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap demokratis seorang implementor kebijakan publik berperan penting dalam proses mengimplementasi kebijakan, agar agar aspirasi masyarakat akan terserap sangat diperlukan adanya keterbukaan dan menerima kritik dan saran setiap komponen masyarakat yang ada, tentu dalam hal ini adanya pola prioritas dan kepentingan umum yang lebih luas yang perlu mendapatkan perhatian secara lebih.

4. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah standar operasional prosedur (SOP) sebagai petunjuk pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu. Jones (1991:304) mengemukakan bahwa "organisasi memerlukan perhatian paling utama karena sangat penting bagi pembahasan konsep birokrasi". Senada dengan yang dikemukakan oleh ahli dibawah ini.

Nawawi (2007:138-139) menyatakan "bahwa struktur birokrasi, organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi –posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hierarchis yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi sebagai melalui lima hal yang harus tergambar yaitu : (1) jenjang hierarkhi jabatan-jabatan manajeral yang jelas sehingga terlihat 'siapa yang bertanggung jawab kepada siapa'; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan, "siapa yang" melakukan apa?, (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan; "siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?" (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain".

Pandangan pakar diatas merupakan bentuk struktur birokrasi yang mempunyai tugas dan fungsi dari setiap organisasi, agar jelas tanggung jawab setiap unit atau bagian tertentu dari agen pelaksana kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*stanrdard operating procedures* atau SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi adalah pembentukan badan atau unit dengan menggunakan beberapa metode yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan yang telah dituang dalam kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila ditunjang oleh kemampuan sumber daya organisasi yang memadai, karena organisasi merupakan wadah dan proses yang menentukan dalam rangka melaksanakan rencana kebijakan. Tujuan awal dari organisasi menurut Jones (1984:170) adalah "menjalankan kebijakan yang dirancang, sebab organisasi merupakan tempat untuk melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya".

Hasil penelitian bahwa struktur organisasi sangat diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen-dokumen pelaksanaan selalu berpedoman pada petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan. Bentuk pedoman berupa format proposal, format usulan dan sampai pada format laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan.

Struktur birokrasi juga diperlukan untuk memetakan tugas dan fungsi masing-masing unit dan tanggung jawab setiap implementor dalam melaksanakan tugasnya, serta alur koordinasi setiap pelaksana kebijakan publik. Struktur birokrasi dalam proses implementasi PNPM-MP di desa Merah Arai adalah berupa tim atau unit yang diketua oleh seorang ketua. Adapun tim yang dimaksud adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Abang Sujatmiko, kemudian tim penulis usulan

serta tim pemelihara. Unit-unit ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Implementasi kebijakan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu dapat disimpulkan bahwa: ” proses implementasi yang dilakukan dengan tahapan-tahapan dari orientasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengendalian dapat dilaksanakan tentu didukung oleh faktor-faktor yang mendukung. Adapun faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut adalah faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor seperti yang telah dibahas diatas merupakan penggerak atau mesin yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan, agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka faktor-faktor diatas akan menjadi perhatian utama. Proses implementasi setiap kebijakan publik akan ada manfaat apabila dalam pelaksanaan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat baik tertulis maupun secara lisan. Aspirasi masyarakat harus diseleksi dalam rangka memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang segera ditindaklanjuti dengan kebijakan publik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses implementasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap orientasi dan sosialisasi kegiatan, pelaksanaan orientasi dan sosialisasi program PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai dilakukan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan kelompok perempuan yang dipilih oleh masyarakat sendiri, yang menginventarisasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung program. Implementasi kebijakan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai pada tahap orientasi dan sosialisasi sudah terlaksana dengan baik dan diterima oleh kelompok sasaran.
 - b. Tahap perencanaan kegiatan Implementasi Kebijakan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai yang seharusnya melibatkan semua pihak, namun hasil penelitian belum terlaksanakan sesuai dengan program tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa rumah tangga miskin masih menyerahkan kepada perangkat desa, dengan alasan tidak mempunyai waktu untuk meninggalkan kerja sebagai petani.
 - c. Tahap pelaksanaan kegiatan Implementasi kebijakan PNPM-MP yang mendorong swadaya masyarakat desa merupakan proses pelaksanaan fisik yang memerlukan tenaga kerja. Pelaksanaan fisik berupa pembangunan gedung serbaguna sudah terlaksana dengan melibatkan semua semua tenaga

yang mau dan mempunyai keterampilan sesuai dengan keahliannya masing-masing, dengan demikian pada tahap pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

- d. Tahap pelestarian kegiatan Implementasi kebijakan PNPM-MP penguatan kelembagaan masyarakat desa merupakan tahapan mengaktifkan terus menerus dari manfaat program pemberdayaan. Tahapan pelestarian di desa Merah Arai mengalami kendala pada pemahaman beberapa anggota masyarakat menganggap selesai kegiatan, program tersebut dianggap selesai.
 - e. Tahap pengendalian kegiatan PNPM-MP, kegiatan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan ini sudah dilaksanakan oleh badan pengawas yang berada di desa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Pelaksanaan pengawasan ini mengalami kendala, yaitu terjadi ketidak harmonisasi antara Tim Pengelola Kegiatan, masing-masing mempunyai pendapat dan persepsi yang berbeda.
2. Analisis faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP di desa Merah Arai, adapun faktor yang berpengaruh sebagai berikut:
- a. Faktor Komunikasi, implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Adapun unsur komunikasi adalah (1) penyaluran *transmisi* (2) Kejelasan (3) Konsistensi. Ketiga unsur dalam komunikasi ini berperan sekali dalam proses implementasi kebijakan publik.

- b. Faktor sumberdaya, yaitu 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya material dan 3) sumber daya metode. Faktor-faktor diatas merupakan motor penggerak dari semua program kegiatan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan dilapangan. Hasil penelitian bahwa faktor sumber daya berpengaruh pada proses dan tahapan yang dilaksanakan, dapat digambarkan bahwa sumber daya manusia merupakan implementor yang mengoperasionakan semua kegiatan, sumberdaya material merupakan bahan – bahan untuk dioperasionakan dan sumberdaya metode merupakan petunjuk dan pedoman dalam rangka mengoperasionakan kegiatan. Hasil penelitian bahwa sumber – sumber diatas berpengaruh terhadap keberhasilan dan terlaksananya suatu kegiatan.
- c. Faktor disposisi (sikap) implementor, yaitu 1) Komitmen, 2) kejujuran, 3) komunikatif, 4) cerdik dan 5) demokratis. Faktor – faktor diatas merupakan modal seorang implementor dalam mengimplementasi suatu kebijakan, agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik dilapangan maka seorang implementor harus memiliki disposisi atau sikap tersebut. Hasil penelitian bahwa implementor belum memiliki sikap-sikap diatas secara utuh. Gambarannya bahwa implementor belum mampu cerdik untuk mengatasi masalah tidak tepat waktu, oleh karena material bangunan didatangkan dari tempat lain. Sehingga pelaksanaan mengalami keterlambatan penyelesaian bangunan gedung serbaguna, namun demikian gedung tersebut pada akhirnya juga selesai dengan baik.

d. Faktor Struktur Birokrasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi itu dibingkai untuk menunjukan interaksi formal yang ditetapkan. Adapun unsur struktur birokrasi yang harus dimiliki oleh organisasi adalah : (1) jenjang hierarki jabatan (2) Pelembagaan (3) Salur Komunikasi (4) Jaringan informasi dan (5) Hubungan antara satuan kerja. Unsur diatas berperan penting dalam proses implementasi kebijakan publik, sebab tanpa unsur-unsur diatas akan terjadi tumpang tindih fungsi dan tanggungjawab masing-masing unit pelaksana.

Selain faktor –faktor diatas masih ada faktor lain yang sangat berpengaruh sekali dalam mengimplementasikan PNPM-MP yaitu faktor transportasi mencapai desa Merah Arai dari ibu kota kecamatan masih menggunakan jalur sungai kayan, sementara debit sungai kayan sangat pluktuatif, sehingga menjadikan alat transportasi sulit pada musim kemarau. Transportasi merupakan kendala yang sangat penting dalam memobilisasi bahan-bahan bangunan yang tersedia di ibukota kecamatan. Hasil penelitian bahwa faktor transportasi disini adalah memobilisasi bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan gedung. Gambaran faktor transportasi yang sangat berpengaruh adalah dimana harga-harga material menjadi tinggi karena biayanya besar untuk mendatangkan material ketempat pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi setiap program pemerintah yang akan diimplementasikan dengan mengkomunikasikan kepada semua pihak, agar apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dapat dipahami dan direspon oleh kelompok sasaran. Dengan mendapatkan pemahaman, berarti masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang pada akhirnya mereka menjadi paham akan kebijakan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
2. Mengefektifkan setiap program yang dikeluarkan dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin lebih tepat sasaran dan dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan diri masyarakat miskin. Kepercayaan diri masyarakat miskin dibangun melalui pemberdayaan dengan mengikut sertakan setiap pelatihan dan pendidikan keterampilan yang menopang pengetahuan dan kemandirian masyarakat secara kelompok maupun individu.
3. Mengefektifkan dokumen musyawarah perencanaan pembangunan yang diusul oleh desa, atas dasar penggalian potensi oleh masyarakat sendiri. Perencanaan yang berasal dari bawah ini merupakan aspirasi yang murni dan untuk dilaksanakan tanpa kepentingan, sehingga dapat bermanfaat dan mencapai sasaran yang tepat.
4. Mengupayakan akses jalan darat menuju dan dari desa Merah Arai ke desa lain serta ibu kota kecamatan, agar berfungsi dengan baik dan masyarakat dapat memperpendek jarak tempuh dan efisien waktu dan biaya. Transportasi merupakan masalah yang sangat dominan, maka perlu pengoptimalan jalan agar

berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan dengan lebih dioptimalkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah yang ada.

5. Pelaksanaan setiap program – program pemberdayaan lain hendaknya mengoptimalkan peran serta dari masyarakat sasaran untuk ikut dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan.
6. Para implementor harus mampu menganalisa dan mencari strategi berbagai faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan setiap kebijakan, dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan inventarisasi kekuatan dan kelemahan yang ada di kelompok sasaran, sehingga diperoleh suatu peluang untuk mengantisipasi tantang yang dapat menjadi penghambat dalam mengimplementasikan suatu program.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA.

- Effendy, O.U. (1993). *Dinamika Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Prasojo, (2010). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Faisal & Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi* : IKP Malang.
- Foy & Nancy. 1994. *Emowering Peopple at Work*. London: Grower Publishing Company.
- Hadi & Sutrisno. (1986). *Metode Penelitian Ilmiah* : Gramedia. Jakarta : Pustaka Utama Jakarta.
- Prasetyo. (2005). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Yun, (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universita Terbuka.
- Jones. C.O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kismartini, (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Siwi, K U. (2001). *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta : LAN
- Mantra & Bagoes. (2004), *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI-Press.
- Muhammad, (1995). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, L.J. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Istianda, *Panduan Belajar MAPU 5304*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Mulyana, D (2000). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.

- Nawawi, I. (2009), *Public Policy*. Surabaya : PMN
- Nugroho, (2008). *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Pace . (1998). *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Suciati, dkk. (2011). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Sumaryadi, (2005), *Efektivitas Implementasi Kebijakan otonomi Daerah*, Jakarta : Citra Utama
- Supriyadi. (2005). Pengaruh Koordinasi dan Bantuan Dana Pembangunan Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa. Program Pascasarja STPDN/IPDN Depdagri Republik Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah* ISSN.1829-5193.
- Soenarko, (2000). *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kkebijakan Pemerintah*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Sanyoto. (2010). *Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur Perdesaan* : Pontianak; Universitas Tanjung Pura.
- Suryabrata, S. (2000). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha. M. (1996). *Perilaku Organisasi*: Jakarta: Raja Grafibdo Persada.
- Winarnor, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wilson & Terry. 1996. *The Empowerment Manual*. London : Grower Publishing Company.
- Yowono. (2006), *Pelayanan Publik dan Kemiskinan*, Surakarta : Sebelas Maret
- Yowono,S. (1985). *Iktisar Komunikasi Administrasi*, Yogyakarta : Liberty.

Dokumen Pemerintah.

Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Petunjuk Teknis Operasional : *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan* : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dokumen dari internet, halaman web.

Julius, (2012). Pengertian Jujur. Diambil 24 Agustus 2012 dari situs <http://julius12.wordpress.com/2010/0328/pengertian-jujur>.

Syamrilaode, (2011). Pengertian Sarana dan Prasarana. Diambil dari 6 Agustus 2012 Situs Word Web <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan-prasarana/#ixzz1uSXuv0Re>.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A.1. Unsur di Kabupaten (Kantor Pemdes)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak selaku Kepala Kantor PEMDES, apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah dapat terlaksana dengan baik ?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apa saja peranan Kantor Pemdes dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sintang?
- 3) Menurut pendapat Bapak, bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
- 4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

B. 1. Unsur di Kecamatan (Camat Kayan Hulu)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak selaku Camat, apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah dapat terlaksana dengan baik ?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran Camat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan Hulu?
- 3) Menurut pendapat Bapak, bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
- 4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.**A. Sumber Daya**

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

B.2. Unsur di Kecamatan (PjOK)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

- 3 **Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.**
- 5) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

- 6) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran PjOK dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan Hulu?
- 7) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
- 8) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

4 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana bentuk
- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

B. 3. Unsur di Kecamatan (Fasilitator Kec/Teknik Kec.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

5 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 9) Menurut pendapat Bapak /ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaaan ? khusus di desa Merah Arai ?
- 10) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran FK/FT-Kec dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaaan di kecamatan Kayan Hulu?
- 11) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaaan yang dilakukan selama ini ?
- 12) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaaan?

6 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

B. 4. Unsur di Kecamatan (UNIT PENGELOLA KEGIATAN)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

7 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

13) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

14) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran UPK dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan Hulu?

15) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

16) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

8 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana bentuk

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

C. 1 Unsur di DESA (Kades)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
- 2) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai
- 3) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
- 4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

C. 2. Unsur di DESA Sekdes

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

- 3 **Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.**
- 5) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

- 6) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai
- 7) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
- 8) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

4 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi kuantitas maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

C. 3. Unsur di DESA BPD

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

- 5 **Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.**
 - 9) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? Khusus di desa Merah Arai ?
 - 10) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai
 - 11) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
 - 12) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
- 6 **Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.**

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

C. 4. Unsur di DESA TOMAS.

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

7 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 13) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
- 14) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai
- 15) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
- 16) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

8 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

C. 5. Unsur di DESA (TPK DESA)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

9 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kavan Hulu.

- 17) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
- 18) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran TPK dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai
- 19) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
- 20) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

10 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai? Apakah tersedia orang-orang dapat mengerjakan pekerjaan fisik bangunan gedung?
- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ? Apakah ada bistek bangunan yang akan dibangun dan sudah dibangun?
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA

A.1. UNSUR KABUPATEN.

Unsur di Kabupaten (Kantor Pemdes)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak selaku Kepala Kantor PEMDES, apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah dapat terlaksana dengan baik ?

Jawaban : Bapak H. Hotler Parjaitan, S.Sos, M.Si

Selama program PNPM-MP dilaksanakan di Kabupaten Sintang, hampir tidak ada hambatan dan pengaduan yang berarti kepada Instansi yang saya pimpin, hanya berupa laporan tidak tepat waktu dalam penyelesaian fisik bangunan, khusus bidang sarana dan prasarana, namun demikian kami tetap harus melakukan pembinaan secara intensif lewat staf kami yang membidangi program dimaksud, ya secara umum sudah dapat terlaksana dengan baiklah....

- 2) Menurut pendapat Bapak, apa saja peranan Kantor Pemdes dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sintang?

Jawab :

Pemdes dalam hal ini ya, sebagai Instansi yang ditunjuk sebagai koordinatif, arti pemdes sebagai instansi yang mengkoordinir di tingkat kabupaten.

- 3) Menurut pendapat Bapak, bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Jawab :

Ya, tahapan dapat dilihat dari petunjuk teknis operasional PNPM-MP, tentu tahapannya, dari sosialisasi sampai dengan usulan kegiatann yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat di desa.

- 4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Jawab :

Ya, selama ini, saya rasa tidak ada hambatan yang berarti, hanya masalah pencairan dana yang menjadi keluhan, hal ini berkaitan dengan instansi lain.

2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ?

Jawab :

ya sih, sumber daya manusia relatif, kalau dibilang kurang yang kurang tetapi kalau diberdayakan ya, tetap juga memadai.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Saya rasa untuk kabupaten Sintang ini sudah cukup maju, jadi bahan bangun tetap tersedia, sudah banyak tokoh-tokoh bangunan yang menyediakan material yang diperlukan.

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Jawab :

Ya, petunjuk teknis operasional PNPM-MP itu cukup jelas, dan sudah sangat jelas tahapan dan prosedurnya, dan tidak ada petunjuk yang dikeluarkan oleh pemda.

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

Jawab :

Sumber daya, ya termasuk sumber daya manusia, saya pikir, sudah tidak terlalu menjadi kendala yang berarti, yang selama ini sudah berjalan dan dapat diselesaikan oleh masyarakat setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

Jawab :

Para pelaksana ini, ada yang juga tidak serius, namun selama ini tidak ada laporan kepada kami, ya saya pikir sudah bertanggungjawablah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

Jawab :

Oh ya, tentu, setiap pelaksana memperoleh pelatihan sesuai dengan tingkatan pelaksana. Maksud dari tingkatan pelaksana adalah pelaksana tingkat kabupaten yang di kabupaten, tingkat kecamatan di kecamatan.

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

Jawab :

Mungkin ada, namun tidak terlalu signifikanlah, manusia aja, barang kali tidak focus pada tugas, namunkan tiap tahun di evaluasi dari pelaksana.

- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesasaan ?

Jawab :

Kendala akses menuju desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan yang masih jalan sungai, tentu masih menjadi kendala, yaitu transportasi.

LAMPIRAN 5

B.1. UNSUR KECAMATAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Unsur di Kecamatan (Camat Kayan Hulu)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak selaku Camat, apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab :

Menurut saya, sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, namun pelaksanaan selama ini sudah sesuai dengan tahapan maupun prosedur.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran Camat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan Hulu?

Jawab :

Camat dalam program ini sebagai Pembina di seluruh desa yang mendapatkan dana PNPM-MP ini dan juga membuat Surat Penetapan Camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM-MP

- 3) Menurut pendapat Bapak, bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Jawab :

Tahapan-tahapan tentu mengacu pada petunjuk teknis operasional PNPM-MP yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu tahapan orientasi dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengendalian kegiatan PNPM-MP.

- 4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Jawab :

Ya, kecamatan kayan hulu ini, sebagian besar masih lewat sungai transportasinya, maka yang menjadi kendala adalah transportasi menuju desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, sehingga pembinaan tidak dapat efektif.

2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ?

Jawab :

Menurut saya, SDM juga masuk kategori masih belum memadai secara kualitas, maksud masih sulit cari yang berpendidikan tinggi di desa-desa, sehingga desa memberdayakan yang tersedia, ini menjadi kendala, ketika ada syarat – syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Saya dengar dari masyarakat ini juga masalah, sebab bahan bangunan masih harus memesan dari kota Sintang dan yang paling dekat paling di Nangau Mau. Jadi material ini belum dapat disediakan di ibu kota kecamatan kita ini.

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Jawab :

Ada, petunjuk teknis operasional dan tata cara pencairan dana dan penyerahan dokumen.

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

Jawab :

Ya tadi, SDM masih relatif belum memadai, khususnya di desa Merah Arai, saya dengar penduduknya sedikit saja yang sekolah tinggi.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

Jawab :

Selama ini saya pikir cukup serius dan bertanggungjawablah, khususnya di tingkat UPK yang ada di kecamatan ini.

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

Jawab :

Ada, bagi mereka yang terpilih dari desa mereka masing-masing, mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ada.

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

Jawab :

Menurut saya cukup patuh dan seriuslah menjalankan tugasnya, terutama ketua UPK dan jajarannya untuk di kecamatan.

- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

Jawab :

Hambatan hanya pada transportasi saja, mereka kesulitan menuju desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, terutama biaya yang besar, sungai yang kecil, pada kemarau mereka harus sehari-hari menuju desa terjauh.

Trima kasih.

B.2. UNSUR KECAMATAN

Unsur di Kecamatan (PjOK)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

3 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

5) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

Jawab :

Ya, berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur, ya mereka melalui tahapan yang telah ditentukan.

6) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran PjOK dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan Hulu?

Jawab :

Ya, mengarahkan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang ada, melakukan pengawasan baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban selesai pekerjaan.

7) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Jawab :

Tahapan adalah tahapan persiapan dan sosialisasi awal, perencanaan di desa, kecamatan dan kabupaten. Perencanaan di desa dari MAD sampai dengan pelatihan kader desa, bentuk pelatihan yaitu cara-cara mengajukan usulan dan mengisi formulir –formulir yang ada.

8) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Jawab :

Kalau di kecamatan kayan hulu ini, masalah transportasi menuju desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, jadi kesulitan untuk melakukan pembinaan secara intensif dan efektif.

4 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana bentuk

Jawab :

Menurut saya, SDM sudah dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan sebelum melaksanakan tugasnya, namun tentu masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi masih berjalan dengan baik.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Menurut saya material ini masih menjadi kendala sekali, karena seperti semen dan seng masih di pesan ke Sintang atau Nanga Mau, yang jaraknya cukup jauh dan berbiaya tinggi.

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Jawab :

Metode sudah tersedia, baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, kira sudah ada panduan yang kita sebarluaskan kepada pelaku-pelaku dilapangan.

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

Jawab :

Menurut saya, sudah bertanggungjawab, seriuslah setiap pengurus baik di UPK maupun di TPK.

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

Jawab :

Ada pak, sebelum mereka mendapat tugas, mereka diberi pelatihan di kecamatan, pesertanya utusan tiap-tiap desa yang mendapatkan dananPNPM-MP.

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

Jawab :

Selama ini masih berjalan dengan baik dan masih dianggap patuh dengan ketentuan yang ada, cukup jarang melakukan pembinaan ke desa-desa, sebab tergantung airi pasang atau surut.

- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

Jawab :

Kendala transportasi pak, kita masih lewat sungai sebagian besarnya menuju desa-desa.

B.3. UNSUR KECAMATAN

Unsur di Kecamatan (Fasilitator Kec/Teknik Kec.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

- 5 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.**

- 9) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

Jawab :

Sudah berjalan dengan lancar pak, faktanya sudah berdiri bangunan gedung serbaguna dan sudah diserahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya.

10) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran FK/FT-Kec dalam mengimplementasikan PNPМ Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan Hulu?

Jawab ;

Kami memfasilitas setiap tahapan kegiatan baik di kecamatan maupun di desa.

11) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPМ mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Jawaban :

Tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian.

12) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPМ Mandiri Perdesaan?

Jawab :

Wah ini pak, transportasi menuju desa-desa yang jauh pak, sulit harus naik sampan.

6 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPМ-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPМ-MP di desa Merah Arai?

Jawab :

Sudah kita berdayakan dengan melalui pelatihan kepada pelaksana di lapangan.

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPМ Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Menurut pelaksanaan di lapangan material masih menjadi kendala besar untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan.

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPМ Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Jawab :

Ada pak, pedoman dan petunjuk, kita hanya menjalankan dari aturan yang sudah ada.

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

Jawab :

Kendala, sulit menuju lokasi kegiatan dalam rangka memfasilitasi, kadang kita datangkan ke ibu kota kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

Jawab :

Cukup bertanggungjawab dan serius

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

Jawab :

Ada pelatihan sebelum melaksanakan kegiatan.

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

Menurut saya sangat patuh dan serius.

- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

Jawab ;

Tranprotasi dan material yang tersedia di kecamatan ini, belum ada tokoh bangunan.

B.4. UNSUR KECAMATAN

Unsur di Kecamatan (UNIT PENGELOLA KEGIATAN)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

7 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

13) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

Jawab :

Menurut saya sudah berjalan baik, dan di desa Merah Arai cukup baik pelaksanaan fisiknya bangunannya.

14) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran UPK dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan Hulu?

Jawab :

UPK yang berada di kecamatan ini dipercaya untuk mengelola kegiatan yang berhubungan dengan dana. Pencairan dana, perguliran dana.

15) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Jawab :

Menurut saya, berdasarkan petunjuk PNPM-MP banyak tahapan, dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestaian.

16) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Jawab :

Ya, menjadi hambatan yaitu transportasi menuju desa-desa yang menadpatkan program PNPM-MP.

8 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana bentuk

Jawab :

Menurut saya, sudah memadai, sebagai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, bangunan sudah berdiri sesuai dengan bistek dan gambar dan rancangannya.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Material menurut mereka di lapangan yang menjadi masalah, harus pesan ke Sintang pak

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Jawab :

Ada petunjuk, sudah jelas

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

Menurut saya hampir tidak ada, sebab SDM di desa juga sudah banyak terampil betukang.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?

Jawab :

Sudah bertanggungjawab dan seriuslah, takut juga kena masalah pak.

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

Jawab :

Ada, bagi masyarakat yang terpilih dan diutus dari desanya hasil musyawarah diberikan pelatihan di kecamatan.

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

Jawab :

Secara umum sudah patuh pak, jadi kalau ketahuan tidak patuh segera diganti.

- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

Jawab :

Masalah transportasi dan akses .

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 6

C.1. UNSUR DESA

Unsur di DESA (Kades.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

Jawab :

Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material lama sampai di tempat sini,

- 2) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai

Jawab :

Kami sebagai kades mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa di kecamatan pak bersama BPD.

- 3) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanaan.

- 4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mereka masih menyerahkan urusan ini kepada kepada desa dan aparat desa, sementara program inikan untuk memberdayakan mereka, agar mereka berdaya guna untuk membangun dirinya.

2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

Jawab :

Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini tidak memiliki pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari orangnya.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, namun semen, seng dan lain-lain masih memesan ke Nanga Mau dan cukup jauh lewat sungai dan biayanya cukup besar pak.

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan pedoman

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

SDM yang tersedia belum memadai, baik kualitas maupun kuantitas sehingga perangkat desa masih dominan melaksanakan program ini untuk hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?

Jawab :

Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memahaminya.

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

Jawab :

Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

Jawab :

Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutama fasilitator yang jarang datang ketempat ini.

- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

Jawab :

Kendala transportasi dan akses menuju ke sini, maupun pelaksana di sini turun ke kecamatan pak.

C. 2. UNSUR DESA

Unsur di DESA (SEKDES.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

- 3 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.**

- 5) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

Jawab :

Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material lama sampai di tempat sini,

- 6) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai

Jawab :

Kami sebagai kades mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa di kecamatan pak bersama BPD.

- 7) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanaan.

- 8) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan? Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mereka masih menyerahkan urusan ini kepada kepala desa dan aparat desa, sementara program inikan untuk memberdayakan mereka, agar mereka berdaya guna untuk membangun dirinya.

4 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

Jawab :

Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini tidak memiliki pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari orangnya.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, namun semen, seng dan lain-lain masih memesan ke Nanga Mau dan cukup jauh lewat sungai dan biayanya cukup besar pak.

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?
Ada petunjuk dan pedoman
- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?
SDM yang tersedia belum memadai, baik kualitas maupun kuantitas sehingga perangkat desa masih dominant melaksanakan program ini untuk hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?
Jawab :
Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memahamilah.
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutama fasilitator yang jarang datang ketempat ini.
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
Jawab :
Kendala transportasi dan akses menuju ke sini, maupun pelaksana di sini turun ke kecamatan pak.

C. 3. UNSUR DESA

Unsur di DESA (BPD.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

5 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

9) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

Jawab :

Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material lama sampai di tempat sini,

10) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai

Jawab :

Kami sebagai kades mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa di kecamatan pak bersama BPD.

11) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanaan.

12) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mereka masih menyerahkan urusan ini kepada kepada desa dan aparat desa, sementara program inikan untuk memberdayakan mereka, agar mereka berdaya guna untuk membangun dirinya.

6 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

Jawab :

Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini tidak memiliki pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari orangnya.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, namun semen, seng dan lain-lain masih memesan ke Nanga Mau dan cukup jauh lewat sungai dan biayanya cukup besar pak.

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan pedoman

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

SDM yang tersedia belum memadai, baik kualitas maupun kuantitas sehingga perangkat desa masih dominan melaksanakan program ini untuk hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?

Jawab :

Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memahaminya.

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

Jawab :

Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

Jawab :

Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutama fasilitator yang jarang datang ketempat ini.

- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

Jawab :

Kendala transportasi dan akses menuju ke sini, maupun pelaksana di sini turun ke kecamatan pak.

C. 4. UNSUR DESA

Unsur di DESA (TOMAS.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

- 7 **Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.**

- 13) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

Jawab :

Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material lama sampai di tempat sini,

- 14) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai

Jawab :

Kami sebagai kades mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa di kecamatan pak bersama BPD.

- 15) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanaan.

- 16) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mereka masih menyerahkan urusan ini kepada kepada desa dan aparat desa, sementara program inikan untuk memberdayakan mereka, agar mereka berdaya guna untuk membangun dirinya.

8 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

Jawab :

Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini tidak memiliki pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari\ orangnya.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, namun semen, seng dan lain-lain masih memesan ke Nanga Mau dan cukup jauh lewat sungai dan biayanya cukup besar pak.

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan pedoman

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?
SDM yang tersedia belum memadai, baik kualitas maupun kuantitas sehingga perangkat desa masih dominant melaksanakan program ini untuk hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?
Jawab :
Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memahamilah.
- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak
- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutama fasilitator yang jarang datang ketempat ini.
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
Jawab :
Kendala transportasi dan akses menuju ke sini, maupun pelaksana di sini turun ke kecamatan pak.

C. 5. UNSUR DESA

Unsur di DESA (TPK DESA.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti. Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada informan dikembangkan dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

9 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

17) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

Jawab :

Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material lama sampai di tempat sini,

18) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai

Jawab :

Kami sebagai kades mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa di kecamatan pak bersama BPD.

19) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanaan.

20) Menurut pendapat `Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mereka masih menyerahkan urusan ini kepada kepada desa dan aparat desa, sementara program inikan untuk memberdayakan mereka, agar mereka berdaya guna untuk membangun dirinya.

- 2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor sebelum pelaksanaan kegiatan ?

Jawab :

Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak

- 3) Apakah ada pelaku (*implementor*) yang tidak patuh dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

Jawab :

Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutama fasilitator yang jarang datang ketempat ini.

- 4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

Jawab :

Kendala transportasi dan akses menuju ke sini, maupun pelaksana di sini turun ke kecamatan pak.

UNIVERSITAS TERBUKA

10 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

Jawab :

Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini tidak memiliki pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari orangnya.

- 2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, namun semen, seng dan lain-lain masih memesan ke Nanga Mau dan cukup jauh lewat sungai dan biayanya cukup besar pak.

- 3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan pedoman

- 4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai sumber daya ?

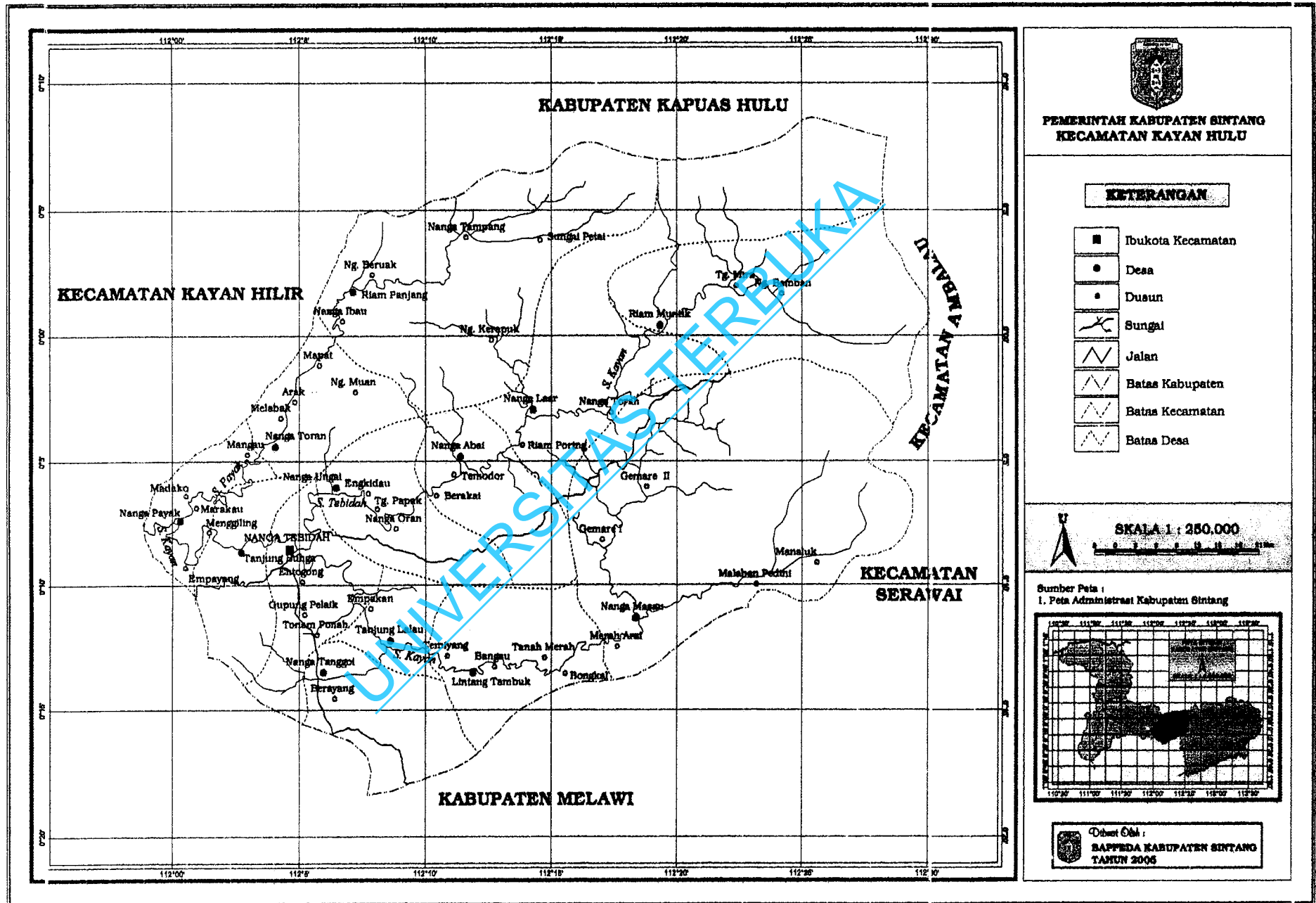
SDM yang tersedia belum memadai, baik kualitas maupun kuantitas sehingga perangkat desa masih dominan melaksanakan program ini untuk hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

- 1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau perilaku para implementor mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang tugasnya?

Jawab :

Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memahaminya.





UNIVERSITAS TERBUKA